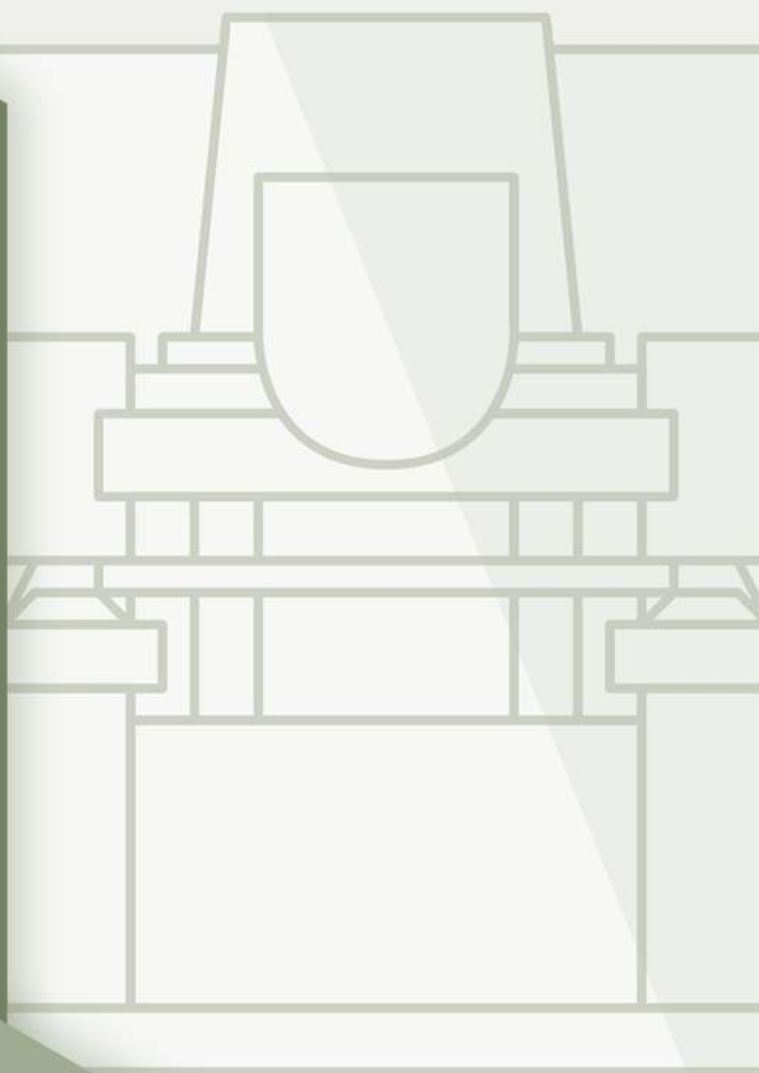




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI

Jalan Suryakencana No. 41 Sukabumi



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh

Puji dan syukur Kami panjatkan hanya kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Kami dapat menyelesaikan penyusunan **“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2024”** ini. Penyusunan **“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2024”** merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja.

“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2024” disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi tahun 2024-2026, **“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2024”** merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024**

mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota guna mewujudkan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Akhir kata, semoga **“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2024”** ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuhu

Sukabumi, 12 Maret 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SUKABUMI

Reni Rosyida Muthmainnah, S.K.M, M.Kes., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19751204 200501 2 009





PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI DINAS KESEHATAN

Jalan Suryakencana No. 41 Kota Sukabumi Kode Pos 43114 Provinsi Jawa Barat

Telp./Fax. 0266-221213

website : <https://dinkes.sukabumikota.go.id>, email : dinkes_kotsi@sanapati.net

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah melakukan reviu internal perangkat daerah atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024 sesuai dengan pedoman penyusunan laporan kinerja yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan-RB) Nomor 53 Tahun 2014. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja sepenuhnya menjadi tanggungjawab manajemen Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagai dokumen pendukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024.

Sukabumi, 12 Maret 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SUKABUMI



Dr. RENI ROSYIDA MUTHMAINNAH, M.Si., M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 19751204 200501 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR GRAFIK	V
DAFTAR GAMBAR	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. MAKSUD DAN TUJUAN LKIP.....	3
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	4
D. ISU STRATEGIS	6
BAB II PERENCANAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 - 2024	11
B. PERJANJIAN KINERJA.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	19
B. REALISASI ANGGARAN	59
BAB IV PENUTUP	63
4.1. KESIMPULAN	64
4.2. RENCANA TIDAK LANJUT	65



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Karyawan Dinas Kesehatan Tahun 2024	5
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2024	15
Tabel 2.2	Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024	15
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024	20
Tabel 3.2	Perbandingan IKU Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024 dengan Capaian 2023	23
Tabel 3.3	Capaian IKU Dinas Kesehatan Kota Sukabumi tahun 2024 dengan Target Capaian IKU tahun 2026 (Akhir Periode Renstra).....	27
Tabel 3.4	Capaian IKU Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024 serta Perbandingannya Terhadap Standar Nasional/Kota Tahun 2024.....	32
Tabel 3.5	Capaian Indikator SPM Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2020 - 2024	38
Tabel 3.6	Angka Stunting di Kota Sukabumi Tahun 2024.....	42
Tabel 3.7	Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Sukabumi Tahun 2024	42
Tabel 3.8	Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 penduduk di Kota Sukabumi Tahun 2024	47
Tabel 3.9	Analisis Efektifitas dan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian IKU Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024	53
Tabel 3.10	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pernyataan Kinerja Tahun 2024	56
Tabel 3.11	Analisis Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024.....	60
Tabel 3.12	Perbandingan Anggaran Murni dan Anggaran Perubahan Dinkes Tahun Anggaran 2024	



3.13 Perbandingan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun
Anggaran 2023 dan 2024



DAFTAR GRAFIK

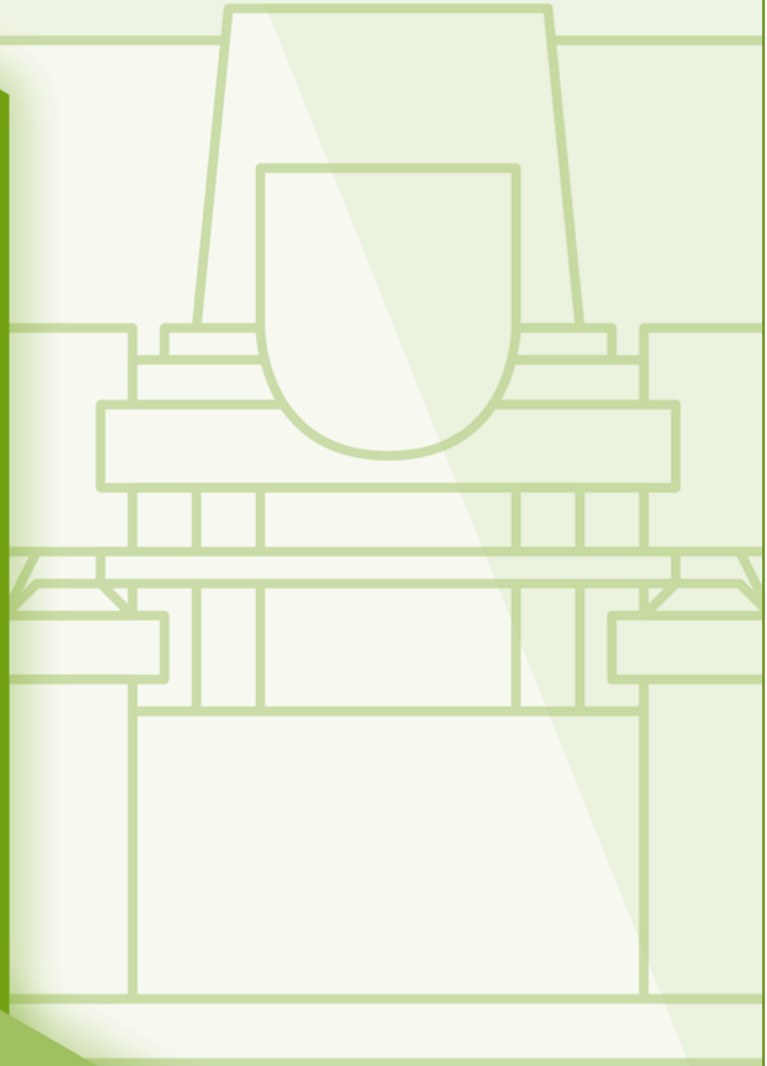
Grafik 3.1	Capaian IP SPM Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2020 - 2024.....	37
Grafik 3.2	Jumlah Peserta JKN Kota Sukabumi Tahun 2024. ...	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Sukabumi	4
Gambar 2.1.	Matriks Tujuan, Sasaran RPD Kota Sukabumo dan Renstra Dinas Kesehatan 2024 - 2026	13





IKHTISAR EKSKLUSIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi beserta jajarannya kepada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Selain itu LKIP Dinas Kesehatan Kota Sukabumi merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Sukabumi tahun 2024 -2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Sukabumi disusun guna mendukung tujuan pembangunan daerah kota sukabumi di bidang kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi tahun 2024-2026 yaitu : **Terciptanya Kualitas SDM yang Berkarakter dan Kompetitif**. Untuk itu, seluruh program kerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam RPD Kota Sukabumi maupun Renstra Dinas Kesehatan tahun 2024-2026.

Dinas Kesehatan Kota Sukabumi telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan 9 (sembilan) indikator kinerja.

Rincian capaian kinerja Dinas Kesehatan pada tahun 2024 masing-masing indikator sasaran strategis dapat dilihat dalam tabel berikut:



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Pencapaian	Keterangan
I	Terpenuhinya SPM Kesehatan					
1	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)	Angka	92	99,56	108,3	Sangat Tinggi
II	Meningkatnya Akses Mutu dan Pelayanan Kesehatan					
2	Prevalensi stunting pada balita	Persen	6	5,85	102,6	Sangat Tinggi
3	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
4	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persen	15,88	95,25	599,7	Sangat Tinggi
III	Meningkatnya Kepesertaan JKN					
5	Persentase kepesertaan JKN	Persen	98,5	99,23	100,7	Sangat Tinggi
IV	Meningkatnya pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan kesehatan					
6	Persentase pemenuhan standar	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024**

	tenaga kesehatan minimal di fasilitas pelayanan kesehatan					
V	Meningkatnya jaminan keamanan pangan, obat dan alat kesehatan bagi kesehatan masyarakat					
7	Persentase pengawasan legalitas dan keamanan pangan, obat dan alat kesehatan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
VI	Meningkatnya peran serta masyarakat dibidang kesehatan					
8	Persentase pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
VII	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah					
9	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Angka	80	79,26	99,1	Sangat Tinggi

Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dilakukan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan prioritas maupun penunjang yang ditujukan untuk pencapaian Tujuan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Terdapat sebanyak 24 (dua puluh empat) kegiatan dan 95 (sembilan puluh lima) sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan berbagai sumber pembiayaan yaitu APBD,

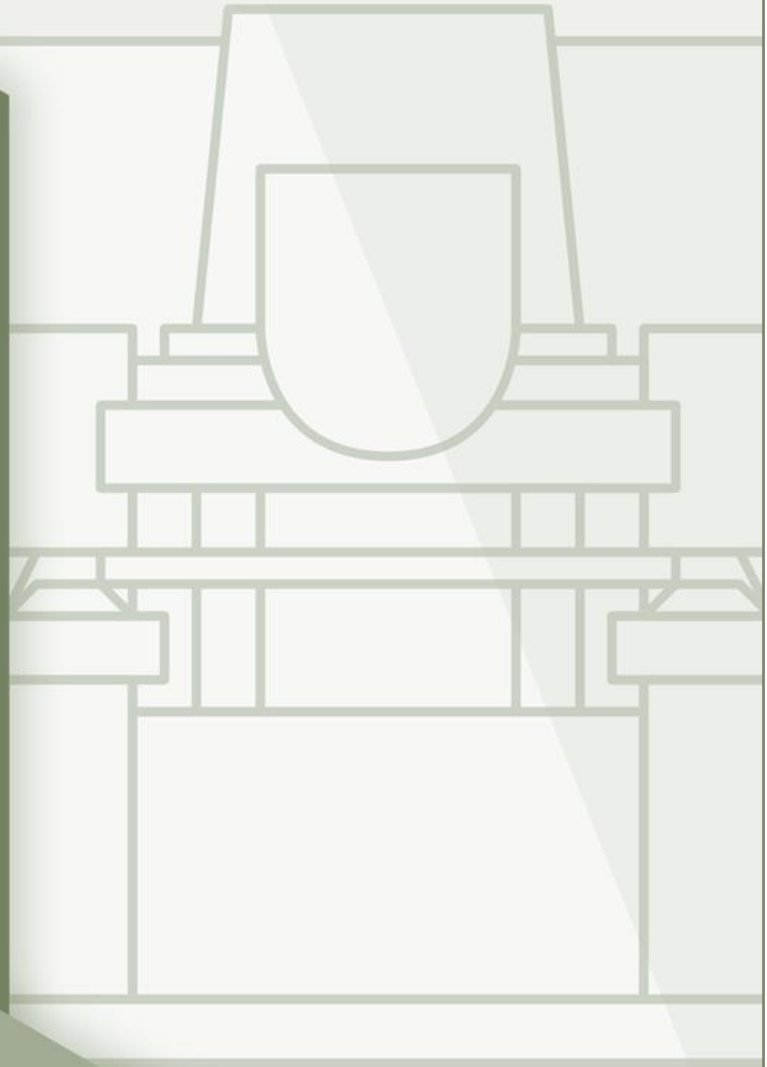


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

DAK, Insentif Fiskal, Pajak Rokok, Bantuan Keuangan Provinsi, Kapitasi dan Non Kapitasi, DBHCHT serta BLUD.

(Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Tahun 2025)



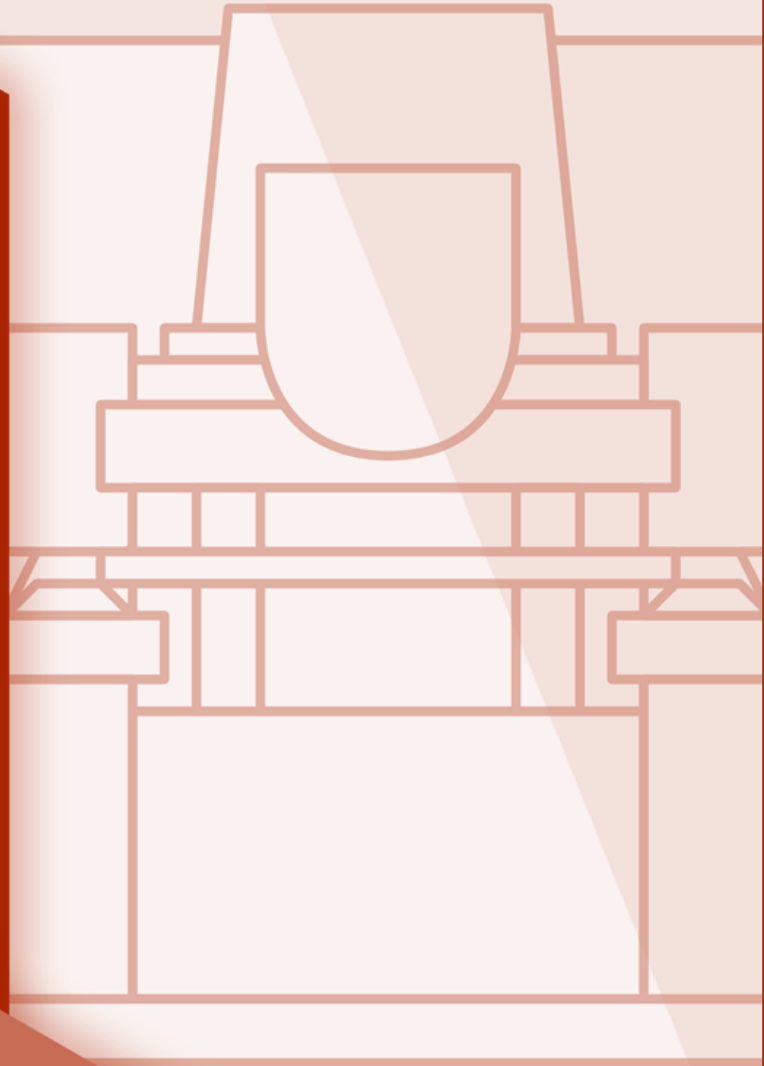


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2023





DAFTAR
PENGHARGAAAN
DINAS KESEHATAN
Tahun 2024



PENGHARGAAN YANG DIRAIH DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2024



Inovasi PASTIKAN (Pantau Status Gizi dan Kesehatan) dari Puskesmas Benteng Meraih Penghargaan Inovasi Terbaik Pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kota Sukabumi Tahun 2024



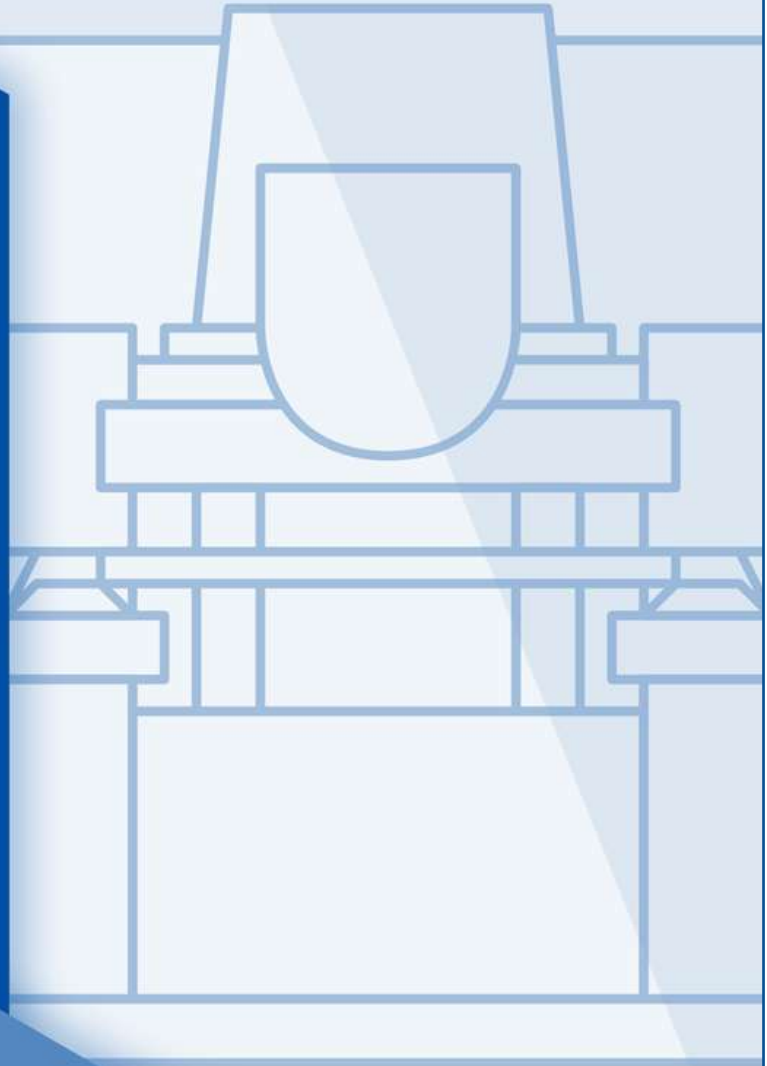
Inovasi INDUKSI (Informasi Edukasi Moms Masa Kini) dari Puskesmas Sukakarya Meraih Penghargaan Top 50 Pada Ajang Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) Tahun 2024





BAB I

Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota, wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah sistem yang mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP di Kota Sukabumi didasarkan pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan



Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kota Kota Sukabumi Tahun 2024, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2023 dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN LKIP

Maksud dari penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah untuk menyampaikan kinerja organisasi Pemerintah Kota Sukabumi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sarana bagi Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi;
2. Bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya *Good Governance*;
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis; dan

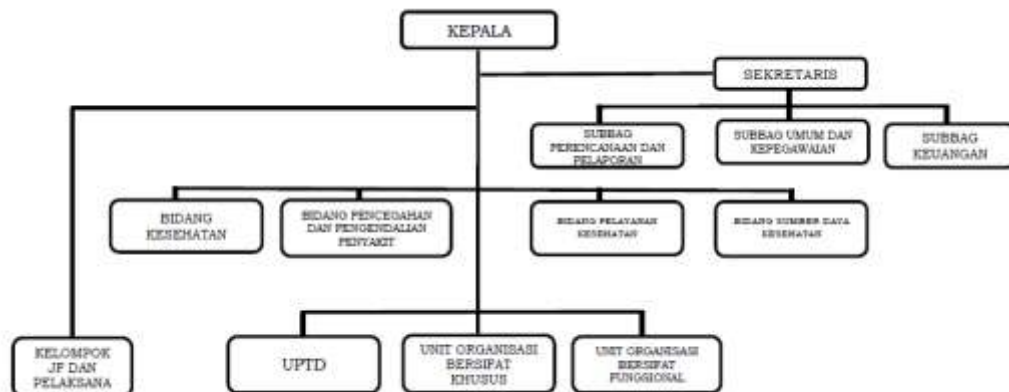


5. Mendorong Dinas Kesehatan Kota Sukabumi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Sukabumi.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi No. 140 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Sukabumi
(Sumber : Peraturan Walikota Nomor 140 tahun 2022)

Pada tahun 2024 terdapat sebanyak 2.062 karyawan Dinas Kesehatan termasuk di dalamnya karyawan UPTD dan UOBK yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan 1.280 diantaranya merupakan karyawan wanita. Berikut adalah Jumlah Karyawan Dinas Kesehatan yang ada disetiap unit kerja.



**Tabel 1.1. Jumlah Karyawan Dinas Kesehatan
Tahun 2024**

No	Unit Kerja	Jumlah Karyawan		
		L	P	Total
1	Dinas Kesehatan	27	56	83
2	Puskesmas Baros	11	27	38
3	Puskesmas Lembursitu	6	16	22
4	Puskesmas Cikundul	6	20	26
5	Puskesmas Cibeureum Hilir	3	20	23
6	Puskesmas Limusnunggal	4	17	21
7	Puskesmas Tipar	9	16	25
8	Puskesmas Gedong Panjang	5	15	20
9	Puskesmas Nanggaleng	7	13	20
10	Puskesmas Benteng	9	14	23
11	Puskesmas Pabuaran	4	17	21
12	Puskesmas Sukakarya	4	13	17
13	Puskesmas Cipelang	6	18	24
14	Puskesmas Karang Tengah	4	21	25
15	Puskesmas Selabatu	7	19	26
16	Puskesmas Sukabumi	3	30	33
17	Labkesda	3	9	12
18	SIGAP	14	6	20
19	RSUD Syamsudin SH	620	882	1.502
20	RS Al Mulk	30	51	81
	TOTAL	782	1.280	2.062



1.4. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena memiliki dampak yang signifikan bagi entitas yaitu daerah atau masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu strategis dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu permasalahan pembangunan daerah, dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan daerah, dan KLHS. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Berdasarkan perumusan isu strategis yang telah dilaksanakan dan dimuat dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, maka issue strategis di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi adalah :

1. Belum optimalnya pencapaian SPM Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengamanahkan adanya 12 (dua belas) indikator SPM dibidang kesehatan pada Kabupaten/Kota. Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan di



Kota Sukabumi harus berupaya maksimal dalam melaksanakan SPM tersebut yang targetnya adalah 100%. SPM ini adalah pelayanan wajib yang harus dilakukan kepada masyarakat dan Pemerintah wajib memfasilitasi pelaksanaan SPM ini, dan apabila Kepala Daerah yang tidak melaksanakan SPM ini akan dikenakan sanksi.

2. Tren penyakit TB, AIDS dan Malaria serta penyakit menular lainnya.

Kota Sukabumi saat ini masih menghadapi masalah *triple burden diseases* yaitu suatu kondisi dimana di satu sisi penyakit menular masih menjadi masalah ditandai dengan terjadinya KLB penyakit menular tertentu, munculnya kembali beberapa penyakit menular lama (*re-emerging diseases*), serta munculnya penyakit-penyakit menular baru (*new-emergyng diseases*) seperti HIV/AIDS. Penyakit infeksi atau menular yang masih menjadi masalah masyarakat Kota Sukabumi diantaranya adalah Tuberculosis (TB). Penyembuhan penyakit TB memerlukan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 6 (enam) bulan. Dengan lamanya kurun waktu penyembuhan maka akan memungkinkan terjadinya kasus *Drop Out* yang akhirnya akan menurunkan tingkat Kesembuhan TB Paru (*Cure Rate TB*). Selain itu menurunnya tingkat kesembuhan TB Baru bisa disebabkan karena tidak terlaporkannya hasil akhir pengobatan terutama penderita yang ditemukan dan diobati di Rumah Sakit kemudian dipindahkan ke Fasilitas kesehatan/ Puskesmas sesuai domisili tinggal di Luar Kota Sukabumi.

3. Masih rendahnya jamban sehat.

Derajat kesehatan paling besar dipengaruhi oleh faktor Lingkungan. Kondisi lingkungan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan sehat tidaknya suatu



masyarakat. Dinas kesehatan selaku penanggung jawab upaya kesehatan di tingkat Kota terus melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan Kesehatan Lingkungan melalui staregi STBM (Sanitasi Tobal Berbasis Masyarakat).

Berdasarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM, 5 (lima) pilar STBM adalah tidak buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.

Dari 5 Pilar STBM, Jamban sehat merupakan salah satu pilar yang paling sedikit dapat dipenuhi oleh masyarakat Kota Sukabumi. Dimana dengan jamban yang tidak sehat, dapat menimbulkan risiko pencemaran lingkungan yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan penyakit khususnya penyakit berbasis lingkungan seperti Polio, Diare, Penyakit Kulit.

4. Tingginya angka penyakit tidak menular

Hasil Riset kesehatan Dasar tahun 2018 menyebutkan penyakit tidak menular di Indonesia meningkat dibandingkan pada tahun 2013. Berdasarkan data Riskesdas 2018 menunjukkan peningkatan pengidap penyakit diabetes, hipertensi, kanker, stroke dan, ginjal kronik naik secara signifikan. Jika dibandingkan dengan hasil riset pada 2013, prevalensi kanker meningkat dari 1,4 persen jadi 1,8 persen, pengidap stroke dari 7 persen menjadi 10,9 persen, penyakit ginjal kronik naik dari 2 persen jadi 3,8 persen. Sementara berdasarkan pemeriksaan gula darah, penyakit diabetes melitus naik dari 6,9 persen jadi 8,5 persen. Hasil pengukuran tekanan darah menunjukkan penyakit hipertensi naik dari 25,8 persen jadi 34,1 persen. Kenaikan prevalensi penyakit tidak menular ini berhubungan dengan pola hidup seperti jumlah perokok, konsumsi alkohol, aktivitas fisik, serta konsumsi buah dan sayur.



Meningkatnya PTM dapat menurunkan produktivitas sumber daya manusia, bahkan kualitas generasi bangsa. Hal ini berdampak pula pada besarnya beban pemerintah karena penanganan PTM membutuhkan biaya yang besar. Pada akhirnya, kesehatan akan sangat mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi.





BAB II

Perencanaan Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2024 - 2026

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Seiring telah ditetapkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, kemudian karena masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi akan berakhir pada 20 September Tahun 2023, maka dengan demikian terdapat konsekuensi logis dimana Kota Sukabumi



tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sampai nanti disusunnya RPJMD periode Tahun 2025-2030 yang merupakan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih masa bakti 2025-2030.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), Pemerintah Daerah Kota Sukabumi harus menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang nantinya akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan penyusunannya bersamaan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026.

Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan adalah selaras dan sinergi dengan Tujuan dan Sasaran bidang kesehatan pada dokumen RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 - 2026, dimana Sasaran dan Indikator Sasaran dalam RPD tersebut dijadikan Tujuan dan Indikator Tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Hal tersebut sebagai salah satu ikhtiar untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan yang akan dilakukan Dinas Kesehatan sehingga mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 - 2026.

Tujuan pembangunan kesehatan dalam RPD yang bersinggungan dengan Renstra adalah Tujuan RPD (2) yaitu *“Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif”*, dengan indikator tujuan: *“Indeks Pembangunan Manusia”*. Tujuan tersebut akan dicapai melalui sasaran:



“meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” dengan indikator :
“Indeks Keluarga Sehat Sukabumi” dan Tujuan RPD (4) yaitu
“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif”, dengan
indikator tujuan: “Indeks Reformasi Birokrasi”. Tujuan tersebut akan
dicapai melalui sasaran: “Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan publik” dengan indikator : “Persentase
layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi”

Adapun kesinambungan tersebut dapat terlihat pada gambar di
bawah ini :

Gambar 2.1
Matriks Tujuan, Sasaran RPD Kota Sukabumi dan
Renstra Dinas Kesehatan 2024 - 2026

RPD	Tujuan RPD (2) Terwujudnya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif Indikator Tujuan RPD Indeks Pembangunan Manusia Sasaran RPD Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indikator Sasaran RPD Indeks Keluarga Sehat Sukabumi (IKSS)		Tujuan RPD (4) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif Indikator Tujuan RPD Indeks Reformasi Birokrasi Sasaran RPD Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik Indikator Sasaran RPD Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	
RENSTRA	Tujuan Renstra 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas Indikator Tujuan Renstra 1. Indeks Keluarga Sehat Sukabumi (IKSS)		Tujuan Renstra 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Indikator Tujuan Renstra 2. Predikat SAKIP Dinas Kesehatan	
	Sasaran Renstra 1.1. Terpenuhinya SPM kesehatan 1.2. Meningkatnya Akses Muta dan Pelayanan Kesehatan 1.3. Meningkatnya Kepesertaan JKN 1.4. Meningkatnya pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan kesehatan 1.5. Meningkatnya jaminan keamanan pangan, obat dan alat kesehatan bagi kesehatan masyarakat 1.6. Meningkatnya peran serta masyarakat di bidang kesehatan		Sasaran Renstra 2.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah 2.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang kesehatan	
	Indikator Sasaran Renstra 1.1.1 Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Kesehatan 1.2.1 Persentase stunting pada balita 1.2.2 Persentase pemenuhan dengan ketersediaan obat esensial 1.2.3 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi nasional 1.3.1 Persentase kepesertaan JKN 1.4.1 Persentase pemenuhan standar tenaga kesehatan minimal di fasilitas pelayanan kesehatan 1.5.1 Persentase pemenuhan legalitas dan keamanan pangan, obat dan alat kesehatan 1.6.1 Persentase pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan		Indikator Sasaran Renstra 2.1.1 Nilai SAKIP Dinas Kesehatan 2.2.1 Persentase pemenuhan kualitas kinerja pelayanan publik di fasilitas kesehatan	

(Sumber : Hasil Analisis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, 2023)

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 - 2026.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024 sebagai dasar bagi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terpenuhinya SPM Kesehatan	1.1 Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)	92
2	Meningkatnya Akses Mutu dan Pelayanan Kesehatan	2.1 Prevalensi stunting pada balita	6%
		2.2 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	100%
		2.3 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	15,88%
3	Meningkatnya Kepesertaan JKN	3.1 Persentase kepesertaan JKN	98,5%
4	Meningkatnya pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan kesehatan	4.1 Persentase pemenuhan standar tenaga kesehatan minimal di fasilitas pelayanan kesehatan	100%
5	Meningkatnya jaminan keamanan pangan, obat dan alat kesehatan bagi kesehatan masyarakat	5.1 Persentase pengawasan legalitas dan keamanan pangan, obat dan alat kesehatan	100%
6	Meningkatnya peran serta masyarakat dibidang kesehatan	6.1 Persentase pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	100%
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	7.1 Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	80

Tabel 2.2. Program dan Anggaran Dinas Kesehatan
Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	77.971.132.211,00
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.154.281.906,00
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	534.031.000,00



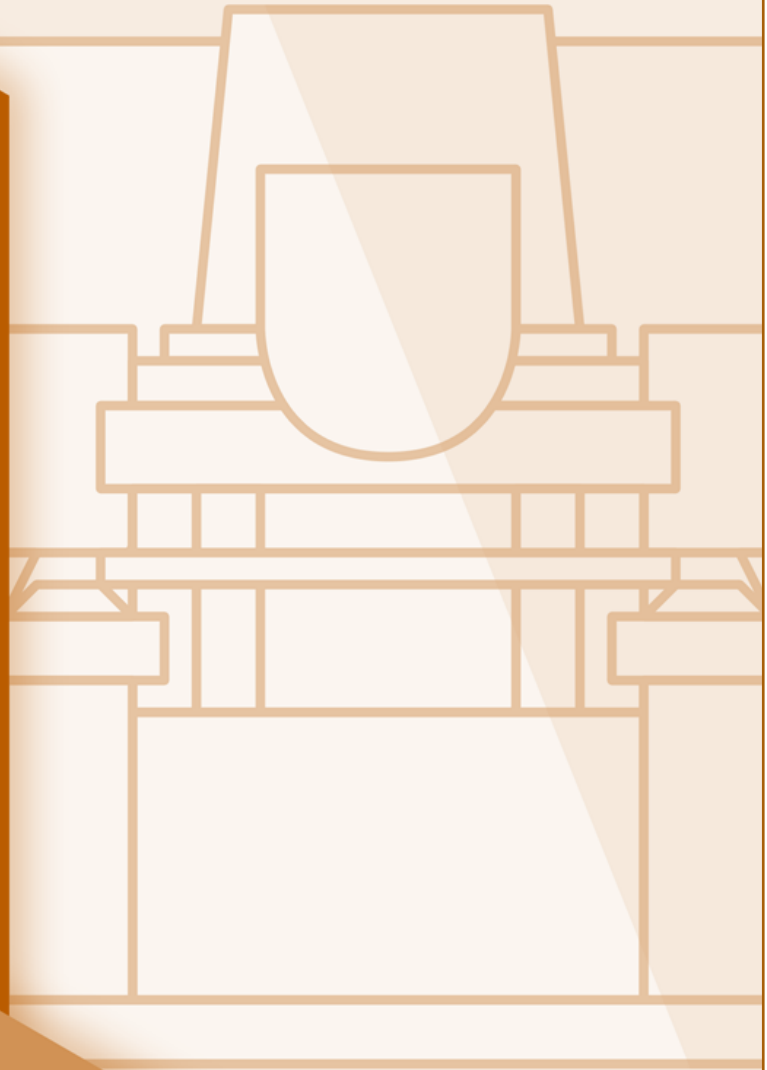
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.267.258.132,00
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	435.092.025.069,00
	JUMLAH	519.018.728.318,00



BAB III

Akuntabilitas Kinerja



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hal ini diperlukan untuk mencapai akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan kinerja. Atas dasar hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi selaku pengemban amanah masyarakat Kota Sukabumi melaksanakan kewajiban akuntabilitas dengan menyajikannya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

Kota Sukabumi Tahun 2024 - 2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan APBD Kota Sukabumi Tahun 2024. Secara substantif, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024 merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota guna mewujudkan *Clean Government* dan *Good Governance*.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi diukur realisasinya berdasarkan tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun dan disepakati dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024 dan mekanismenya mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap IKU yang merupakan indikator dari sasaran strategis RPD dan sudah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerjanya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis*	Indikator Kinerja*	Satuan	Target Tahun 2024**	Realisasi IKU Tahun 2024	Capaian IKU 2024 (%)	Interpretasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terpenuhinya SPM Kesehatan	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)	Angka	92	99,56	108,3	SANGAT TINGGI
2.	Meningkatnya Akses Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Prevalensi stunting pada balita	Persen	6	5,85	102,6	SANGAT TINGGI
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Persen	100	100	100	SANGAT TINGGI
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persen	15,88	95,25	599,7	SANGAT TINGGI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis*	Indikator Kinerja*	Satuan	Target Tahun 2024** *	Realisasi IKU Tahun 2024	Capaian IKU 2024 (%)	Interpretasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Meningkatnya Kepesertaan JKN	Persentase kepesertaan JKN	Persen	98,5	99,23	100,7	SANGAT TINGGI
4.	Meningkatnya pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan kesehatan	Persentase pemenuhan standar tenaga kesehatan minimal di fasilitas pelayanan kesehatan	Persen	100	100	100	SANGAT TINGGI
5.	Meningkatnya jaminan keamanan pangan, obat dan alat kesehatan bagi kesehatan masyarakat	Persentase pengawasan legalitas dan keamanan pangan, obat dan alat kesehatan	Persen	100	100	100	SANGAT TINGGI
6.	Meningkatnya peran serta masyarakat dibidang kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	Persen	100	100	100	SANGAT TINGGI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis*	Indikator Kinerja*	Satuan	Target Tahun 2024**	Realisasi IKU Tahun 2024	Capaian IKU 2024 (%)	Interpretasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Angka	80	79,26	99,1	SANGAT TINGGI

Pada tabel 3.1 dapat di lihat dari Sembilan indikator Utama (IKU) Dinas kesehatan semua mendapat capaian kinerja di atas 90% sehingga dapat dikategorikan capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi masuk ke dalam kategori **sangat baik**. Namun demikian apabila melihat ketercapaian target dari 9 indikator kinerja utama yang ditetapkan terdapat 1 indikator yang tidak mencapai target yaitu indikator Nilai SAKIP Dinas Kesehatan yaitu sebesar 99,1%, namun apa bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 nilai evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Sukabumi mengalami kenaikan sebesar 0,75 point dari nilai evaluasi 78,51 tahun 2023 menjadi 79,26 pada tahun 2024.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024**

Tabel 3.2
Perbandingan IKU Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024
dengan Capaian Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Sasaran 1	IKU 1	a	b	$\frac{b}{a} \times 100$	x	y	$\frac{y}{x} \times 100$
	Terpenuhinya SPM Kesehatan	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)	92	99,56	108,3	90	95,06	105,62
2	Sasaran 2	IKU 2						
	Meningkatnya Akses Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Prevalensi stunting pada balita	6	5,85	102,6	8	5,42	147,60



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
3		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	100	100	100	100	100	100
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	15,88	95,25	599,7	26,67	95,24	357,12
	Sasaran 3	IKU 3						
	Meningkatnya Kepesertaan JKN	Persentase kepesertaan JKN	98,5	99,23	100,7	95	100,10	105,37
	Sasaran 4	IKU 4						



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Meningkatnya pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan kesehatan	Persentase pemenuhan standar tenaga kesehatan minimal di fasilitas pelayanan kesehatan	100	100	100	100	100	100
	Sasaran 5	IKU 5						
	Meningkatnya jaminan keamanan pangan, obat dan alat kesehatan bagi kesehatan masyarakat	Persentase pengawasan legalitas dan keamanan pangan, obat dan alat kesehatan	100	100	100	100	100	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Sasaran 6	IKU 6						
	Meningkatnya peran serta masyarakat dibidang kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	100	100	100	100	100	100
	Sasaran 7	IKU 7						
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	80	79,26	99,1	80	78,51	98,14



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

Tabel 3.2 memberikan gambaran capaian IKU Dinas Kesehatan tahun 2024 bila dibandingkan dengan capaian indikator yang sama pada tahun 2023. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa hanya indikator prevalensi stunting pada balita yang mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada tahun 2023 yaitu dari 147.6% menjadi 102,6 % capaian target kinerja, namun demikian target kinerja tahun 2024 telah tercapai yaitu sebesar 102,65.

Tabel 3.3

**Capaian IKU Dinas Kesehatan Kota Sukabumi tahun 2024
dengsn Target Capaian IKU tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2024		2026	
			Target	Realisasi	% Capaian	Target
1	Sasaran 1	IKU 1	a	b	b/a * 100	x
	Terpenuhinya SPM Kesehatan	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)	92	99,56	108,3	92



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2024		2026	
			Target	Realisasi	% Capaian	Target
2	Sasaran 2	IKU 2				
	Meningkatnya Akses Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Prevalensi stunting pada balita	6	5,85	102,6	8
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	100	100	100	100
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	15,88	95,25	599,7	20,44



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2024		2026	
			Target	Realisasi	% Capaian	Target
3	Sasaran 3	IKU 3				
	Meningkatnya Kepesertaan JKN	Persentase kepesertaan JKN	98,5	99,23	100,7	98,7
	Sasaran 4	IKU 4				
	Meningkatnya pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan kesehatan	Persentase pemenuhan standar tenaga kesehatan minimal di fasilitas pelayanan kesehatan	100	100	100	100
	Sasaran 5	IKU 5				



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2024		2026	
			Target	Realisasi	% Capaian	Target
	Meningkatnya jaminan keamanan pangan, obat dan alat kesehatan bagi kesehatan masyarakat	Persentase pengawasan legalitas dan keamanan pangan, obat dan alat kesehatan	100	100	100	100
	Sasaran 6	IKU 6				
	Meningkatnya peran serta masyarakat dibidang kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	100	100	100	100
	Sasaran 7	IKU 7				



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2026
			Target	Realisasi	% Capaian	Target
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	80	79,26	99,1	80

Tabel 3.3 memberikan gambaran perbandingan capaian kinerja IKU Dinas Kesehatan tahun 2024 dengan target capaian IKU pada masa akhir rentra (tahun 2026). Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian IKU Dinas Kesehatan sudah sesuai dengan target akhir renstra pada tahun 2026.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024**

Tabel 3.4
Capaian IKU Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024
serta Perbandingannya Terhadap Standar Nasional/Kota Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/Kota	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
	Sasaran 1	IKU 1	x	y	x/y * 100
	Terpenuhinya SPM Kesehatan	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)	99,56	100	99,56%
	Sasaran 2	IKU 2			
	Meningkatnya Akses Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Prevalensi stunting pada balita	5,85	14	239,32%
		Persentase puskesmas dengan	100	85	117,65%



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/Kota	% Capaian
		ketersediaan obat esensial			
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	95,25	100	95,25
	Sasaran 3	IKU 3			
	Meningkatnya Kepesertaan JKN	Persentase kepesertaan JKN	99,23	95	104,45
	Sasaran 4	IKU 4			
	Meningkatnya pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan kesehatan	Persentase pemenuhan standar tenaga kesehatan minimal di fasilitas	100	100	100



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/Kota	% Capaian
		pelayanan kesehatan			
	Sasaran 5	IKU 5			
	Meningkatnya jaminan keamanan pangan, obat dan alat kesehatan bagi kesehatan masyarakat	Persentase pengawasan legalitas dan keamanan pangan, obat dan alat kesehatan	100	100	100
	Sasaran 6	IKU 6			
	Meningkatnya peran serta masyarakat dibidang kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	100	100	100
	Sasaran 7	IKU 7			



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/Kota	% Capaian
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	79,26	80	99,08%

Tabel 3.4 membandingkan capaian IKU Dinas Kesehatan tahun 2024 dengan standar yang berlaku secara nasional atau standar yang berlaku secara umum di Lingkup Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Dari 9 indikator yang ada terdapat 3 indikator yang belum mencapai standar yaitu : Indeks Pencapaian SPM, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna, dan Nilai SAKIP Dinas Kesehatan



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024**

Tabel 3.5
Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Dan Solusi Yang Telah Dilakukan
Atas LHE SAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Satus/Progres		Link Bukti Dukung
					selesai	sedang proses	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan keberadaan dokumen perencanaan secara lebih berkualitas sesuai standar yang baik untuk mencapai hasil ukuran keberhasilan yang SMART.	Melaksanakan pertemuan penyusunan dokumen perencanaan tahun 2025	Triwulan I 2024	Sekretaris	√		https://drive.google.com/drive/folders/1YcurcR6UHA9UglrK2sWZa-Pp16ANnipO?usp=sharing
		Memfasilitasi unit kerja dalam pengusulan rencana kegiatan tahun 2025	Triwulan I 2024	Sekretaris	√		
		Melaksanakan Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Untuk Penyusunan Perencanaan Tahun 2025	Triwulan I 2024	Sekretaris	√		
		Memfasilitasi unit kerja dalam penyusunan dokumen Pra RKA terhadap Unit Kerja	Triwulan I 2024	Sekretaris	√		
		Memfasilitasi unit kerja dalam pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Triwulan I 2024	Sekretaris	√		
		Menyusun rancangan dokumen Renja Dinkes Tahun 2025	Triwulan I 2024	Sekretaris	√		



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Satus/Progres		Link Bukti Dukung
					selesai	sedang proses	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian reward and punishment, serta penyesuaian strategi dalam pencapaian kinerja.	Memberikan reward terhadap Puskesmas atas kinerja pencapaian program kesehatan Tahun 2023	Jan - April 2024	Kepala Bidang	√		https://drive.google.com/drive/folders/1YnA9barxbS7yyvV59zBVUENK_SkjdFn-?usp=drive_link
3	Menyempurnakan laporan kinerja tahunan (LKjIP) dengan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja serta mencantumkan analisis dan evaluasi atas realisasi kinerja dengan target jangka menengah, dengan target tahun - tahun sebelumnya serta dapat melengkapi	Menyusun rancangan LKjIP tahun 2023 berdasarkan template yang telah ditetapkan	Januari 2024	Sekretaris	√		https://drive.google.com/drive/folders/1YoAEGk57MN_YYBGzvtBspUKK8_yg60gW?usp=drive_link



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Satus/Progres		Link Bukti Dukung
					selesai	sedang proses	
1	2	3	4	5	6	7	8
	informasi atas analisis evaluasi kinerja dengan level nasional (Bencmark kinerja)						
4	Menjadikan laporan kinerja sebagai bahan evaluasi dalam penyesuaian strategi/ kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya sehingga memberikan dampak yang nyata.	Melaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023, dimana hasil evaluasi menjadi bahan untuk penyusunan perencanaan tahun 2025.	Januari 2024	Sekretaris	√		https://drive.google.com/drive/folders/1BZWnsEgfDxC4-1XV_nGRLrVcNKHRaEOp?usp=drive_link
		Melaksanakan evaluasi setiap triwulan terhadap pencapaian kinerja dan keuangan	setiap triwulan	Sekretaris	√		
5	Terus meningkatkan penggunaan teknologi infromasi dalam pengukuran capaian kinerja	Pengunaan aplikasi SIPEKA untuk melihat capaian kinerja dan keuangan dari Bappeda	setiap triwulan	Sekretaris	√		https://sipeka.sukabumikota.go.id/app/samp eu/login/
		Penggunaan aplikasi eppgbm untuk mengukur status gizi balita dari Kemenkes	setiap bulan	Kabid Kesmas	√		https://sigiziterpadu.kemkes.go.id/login_sisfo/



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Satus/Progres		Link Bukti Dukung
					selesai	sedang proses	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penggunaan aplikasi ASIK untuk mengukur capaian imunisasi dari Kemenkes	setiap bulan	Kabid P2P	√		https://sehatindonesia.kemkes.go.id/auth/login
		Penggunaan aplikasi SI-PTM untuk mengukur capaian kinerja pelayanan kesehatan usia produktif	setiap bulan	Kabid P2P	√		https://p2ptm.kemkes.go.id/aplikasi-dan-program-ptm/si-ptm
		Penggunaan aplikasi Komdat untuk mengukur capaian kinerja pelayanan kesehatan masyarakat	setiap triwulan	Kabid Kesmas	√		https://komdatkesmas.kemkes.go.id/login
6	Dapat melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi	Penggunaan aplikasi SIPEKA untuk melihat capaian kinerja dan keuangan dari Bappeda	setiap triwulan	Sekretariat	√		https://sipeka.sukabumikota.go.id/app/sampeu/login/
		Penggunaan Aplikasi ePuskesmas untuk memastikan pelayanan di Puskesmas					https://kotasukabumi.epuskesmas.id/login
		Penggunaan SIPD untuk proses perencanaan dan penganggaran					https://sipd-ri.kemendagri.go.id/auth/login
		e-kinerja untuk SKP					https://kinerja.bkn.go.id/login



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Satus/Progres		Link Bukti Dukung
					selesai	sedang proses	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Terus berupaya meningkatkan implementasi hasil evaluasi AKIP secara berkelanjutan yang telah dibangun di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.	Dinas Kesehatan, berkomitmen untuk mengimplementasikan hasil evaluasi AKIP secara berkelanjutan	setiap bulan	Kepala Dinas	√		https://drive.google.com/drive/folders/1_wgqoB8bACBGsEK1jfrCjXP08CGWCczv?usp=sharing



Sasaran 1	:	Terpenuhinya SPM Kesehatan
Indikator	:	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara.

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan atau yang disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

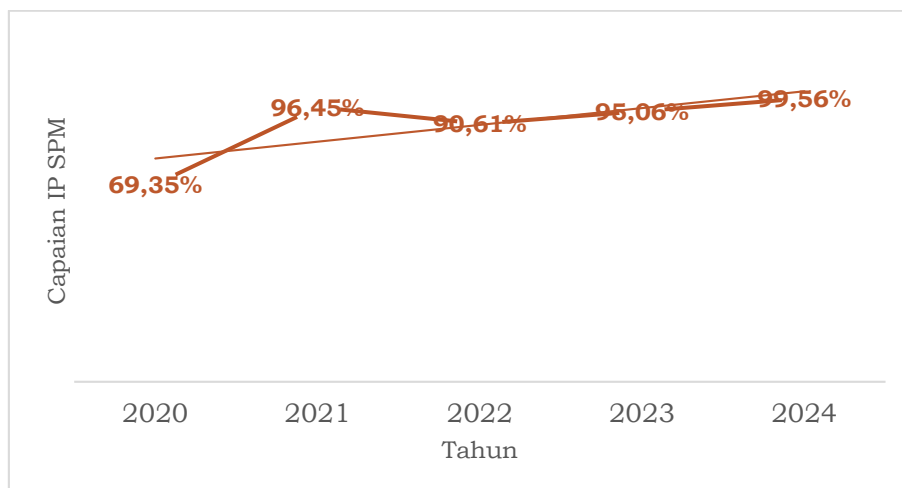
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;



9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Sesuai dengan PP No.2 tahun 2018 SPM adalah merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kemudian sesuai dengan Permendagri No. 59 tahun 2021 target pencapaian kinerja untuk masing indikator SPM kesehatan adalah sebesar 100%.

Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) kesehatan Kota Sukabumi pada tahun 2024 adalah sebesar 99,56 % terdapat kenaikan capaian dibandingkan dengan capaian IP SPM pada beberapa tahun kebelakang sebagaimana digambarkan pada grafik berikut :



**Grafik 3.1. Capaian IP SPM Kesehatan Kota Sukabumi
tahun 2020 - 2024**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

Untuk capaian per indikator SPM kesehatan pada 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Capaian Indikator SPM Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2020 -2024

No.	Indikator	Target	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	101,91%	99,99%	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	100%	103,83%	100%	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	107,08%	108,69%	99.89%	100%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	75,59%	95,54%	95.57%	100%	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	53,81%	105,86%	81.25%	96,62%	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%	27,09%	94,87%	53.08%	72,04	98,37%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%	51,25%	75,00%	91.58%	93,27	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	12,46%	96,51%	91.63%	87,31	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	13,03%	87,90%	100%	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%	91,93%	100,82%	81.57%	91,49%	96,56%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	100%	70,03%	95.06%	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100%	100%	116,49%	97.67%	100%	100%



Sasaran 2	:	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Indikator 1	:	Prevalensi Stunting Pada Balita

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru Nampak saat anak berusia dua tahun. Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) tidak hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi juga mengancam perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan saat ini dan produktivitas anak di masa dewasa.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki prevalensi stunting yang tinggi. Percepatan penurunan stunting merupakan salah satu program prioritas nasional. Melalui Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, penurunan stunting ditargetkan sebesar 14 % pada tahun 2024. Angka ini kemudian mendapatkan koreksi pasca keluarnya hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 sehingga target angka stunting di Indonesia pada tahun 2024 menjadi 18 %, di Jawa Barat menjadi 19 % dan untuk wilayah Kota Sukabumi menjadi 23,52%.

Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dalam dokumen renstra 2024-2026 menargetkan penurunan stunting pada tahun 2024 menjadi sebesar 6%. Angka stunting diperoleh dengan cara pengukuran Bayi dan Balita yang dilaksanakan pada kegiatan bulan penimbangan balita yang dilaksanakan pada bulan Februari dan Agustus. Hasil pengukuran terhadap balita yang dilaksanakan pada tahun 2024 dapat dilihat pada table 3.5 berikut.



Tabel 3.7
Angka Stunting di Kota Sukabumi
Tahun 2024

NO	PUSKESMAS	Jumlah Balita Yang Diukur Tinggi Badan	Balita Stunting (TB/U)	
			Jumlah	%
1	BAROS	1.867	109	5,84
2	LEMBURSITU	1.222	79	6,46
3	CIKUNDUL	1.730	31	1,79
4	CIBEUREUM HILIR	1.523	136	8,93
5	LIMUSNUNGGAL	1.272	115	9,04
6	TIPAR	916	102	11,14
7	GEDONG PANJANG	1.089	34	3,12
8	NANGGELENG	792	59	7,45
9	BENTENG	1.740	75	4,31
10	PABUARAN	662	48	7,25
11	SUKAKARYA	1.196	48	4,01
12	CIPELANG	938	43	4,58
13	KARANG TENGAH	1.807	147	8,14
14	SELABATU	850	18	2,12
15	SUKABUMI	2.603	139	5,34
KOTA SUKABUMI		20.207	1.183	5,85

Sumber : Aplikasi EPPGBM 2024

Dalam upaya menurunkan angka stunting di Kota Sukabumi Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Organisasi Pemerintahan Daerah yang lainnya (OPD) yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting, melakukan berbagai upaya intervensi antara lain :

1. Pendampingan Tim Ahli (SpA dan SpOG) ke Puskesmas dan FKTP lainnya dalam pelayanan KIA, kegawatdaruratan dan system rujukan maternal dan neonatal
2. Surveilans dan Tata laksana Kesehatan Ibu dan Anak
3. Audit Kematian Ibu dan Anak



4. Penguatan Posyandu dan UKBM Lainnya
5. Advokasi, koordinasi dan bimtek Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) posyandu, puskesmas, camat, PKK dan mitra dalam pengelolaan Posyandu Prima dan Posyandu dalam transformasi layanan primer.
6. Pemberian makanan tambahan berbahan pangan local dengan sasaran 1013 wasting dan under weight khususnya pada balita yang menjadi responden Survey Kesehatan Indonesia (SKI).
7. Kunjungan lapangan bumil kurang gizi kronik (KEK), anemia, bumil risti, bayi berat lahir rendah (BBLR) dan bayi balita dengan masalah gizi
8. Kunjungan pembinaan pelayanan ANC, persalinan, PNC bagi Posyandu Prima, Praktik Mandiri dan Posyandu.
9. Pelaksanaan kelas ibu balita.
10. Pelaksanaan kelas ibu hamil.
11. Pembinaan kesehatan sekolah (termasuk skrining kesehatan) pada anak usia sekolah dan remaja.
12. Lokakarya pembuatan SOP tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang : weight falltering, gizi kurang, gizi buruk, stunting termasuk rujukan.
13. Pendampingan pemberian MPASI dan ASI Eksklusif.
14. Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk

Upaya intervensi yang dilakukan ini diharapkan dapat semakin menurunkan angka stunting di Kota Sukabumi.

Sasaran 2	:	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Indikator 2	:	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Essensial

Sebagaimana amanat Undang Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023, Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan obat esensial yang merata dan terjangkau oleh masyarakat (Pasal 317 ayat 3).



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

Ketersediaan obat esensial di Puskesmas merupakan indikator kualitas pelayanan kesehatan yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Pada tahun 2024 Persentase ketersediaan obat esensial di Puskesmas yang ada di Kota Sukabumi adalah sebesar 100%. Ini berarti selama tahun 2024 dari 40 jenis obat esensial yang harus ada di Puskesmas telah terjamin ketersediaannya dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Sasaran 2	:	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Indikator 3	:	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna

Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan permenkes No. 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Fasyankes. Sampai dengan tahun 2024 telah terakreditasi sebanyak 22 Fasyankes terdiri dari : 6 Rumah Sakit, 15 Puskesmas, 1 Laboratorium Kesehatan Daerah. Dengan status akreditasi sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Sukabumi
Tahun 2024

No	Fasyankes	Status Akreditasi
	Rumah Sakit :	
1	RSUD R. Syamsudin, S.H.	Paripurna
2	RSUD Al-Mulk	Paripurna
3	RS Bhayangkara Setukpa Polri	Paripurna
4	RS Assyifa	Paripurna
5	RS Ridogalih	Paripurna
6	RS Kartika Kasih	Paripurna
	Puskesmas :	
1	Puskesmas Baros	Paripurna
2	Puskesmas Lembur Situ	Paripurna



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024**

No	Fasyankes	Status Akreditasi
3	Puskesmas Cikundul	Paripurna
4	Puskesmas Cibeureum Hilir	Paripurna
5	Puskesmas Limus Nunggal	Paripurna
6	Puskesmas Tipar	Paripurna
7	Puskesmas Gedong Panjang	Paripurna
8	Puskesmas Nanggaleng	Paripurna
9	Puskesmas Benteng	Paripurna
10	Puskesmas Pabuaran	Paripurna
11	Puskesmas Sukakarya	Paripurna
12	Puskesmas Cipelang	Paripurna
13	Puskesmas Karang Tengah	Utama
14	Puskesmas Selabatu	Paripurna
15	Puskesmas Sukabumi	Paripurna
	Laboratorium Kesehatan	
1	Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)	Paripurna
Persentase Fasyankes Terakreditasi Paripurna		95,45%

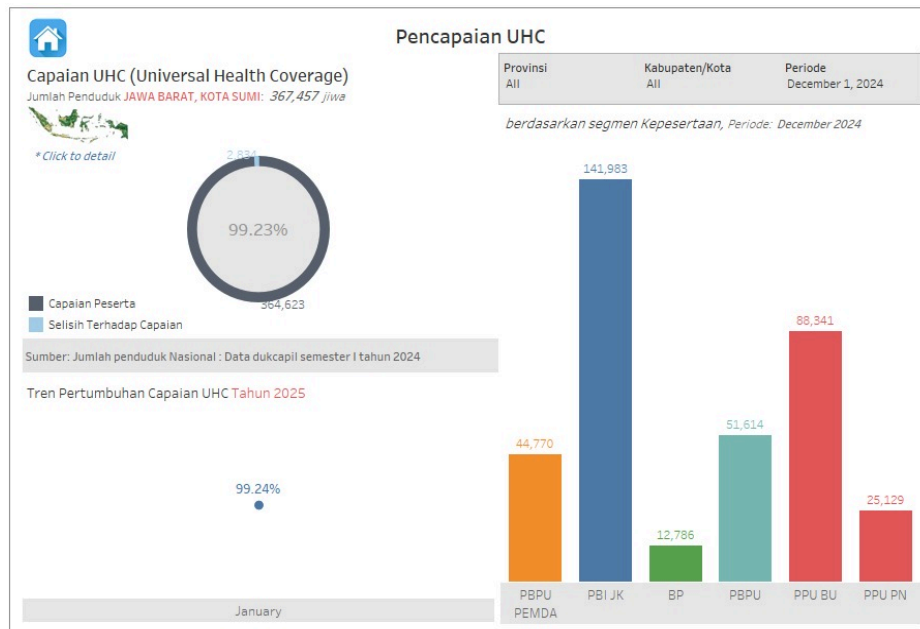
Sasaran 3	:	Meningkatnya Kepesertaan JKN
Indikator	:	Persentase Kepesertaan JKN

Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan dihitung dari jumlah masyarakat yang memiliki kartu/kepesertaan jaminan kesehatan dibagi dengan jumlah keseluruhan masyarakat pada kurun waktu tertentu dikali 100%. Pada tahun 2024, jumlah masyarakat Kota Sukabumi yang telah memiliki jaminan kesehatan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) adalah sebesar 364.623 jiwa dari 367.457 jiwa (99,23%). Rincian



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan seperti yang tertera pada grafik berikut ini :



Sumber : Dataviz.bpjs-kesehatan.go.id, 1 Desember 2024

Grafik 3.2

Jumlah Peserta JKN Kota Sukabumi Tahun 2024

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, bahwa semua penduduk Indonesia harus menjadi peserta JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.

Sasaran 4	:	Meningkatnya Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas SDM dalam Pelayanan Kesehatan
Indikator	:	Persentase Pemenuhan Standar Tenaga Kesehatan Minimal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan



Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengisyaratka bahwa tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

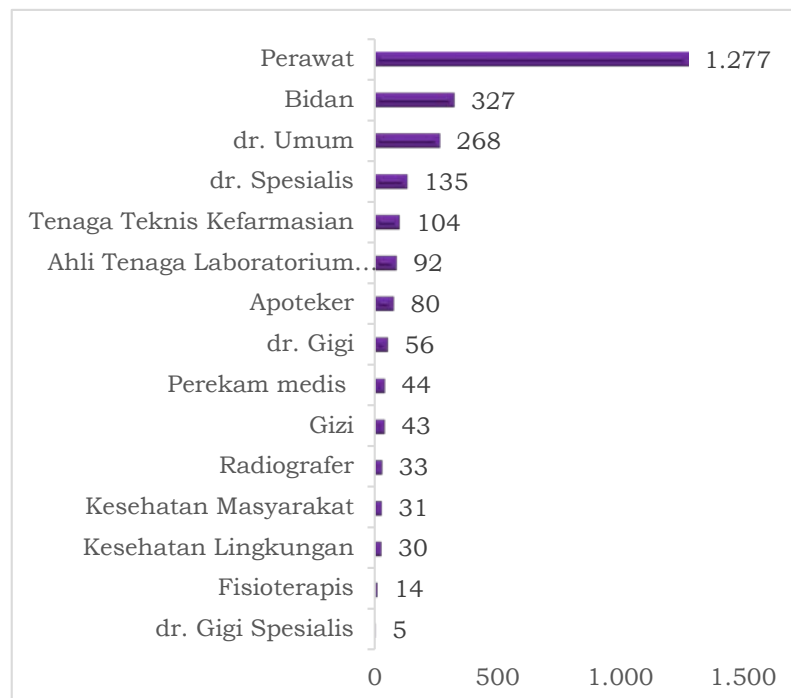
Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan. Yang termasuk ke dalam kategori tenaga medis adalah dokter dan dokter gigi. Tenaga terdiri dari ; tenaga keperawatan, tenaga bidan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterafian fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, tenaga psikolog klinis dan tenaga kesehatan lainnya.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan telah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan. Instansi Kesehatan merupakan salah satu instansi dengan beragam profesi, sehingga mobilisasi pegawai sangat tinggi.



Jumlah tenaga kesehatan di Kota Sukabumi tahun 2024 sebanyak 2.539 orang yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, klinik dan sarana kesehatan lainnya. Sebaran jenis dan jumlah tenaga kesehatan seperti pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.3
Jenis dan Jumlah Tenaga Kesehatan
di Kota Sukabumi Tahun 2024



Sumber : Bidang Sumber Daya Kesehatan, 2024

Tenaga perawat berkontribusi 50,30% sebagai tenaga kesehatan terbanyak di Kota Sukabumi, selanjutnya bidan sebanyak 12,88% diikuti dokter umum sebanyak 10,56%, sementara jumlah tenaga kesehatan lainnya masih berkontribusi di bawah 10%

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan harus memperhatikan rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk yang dilayaninya. Perhitungan rasio tenaga kesehatan digunakan untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan untuk mencapai tenaga



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024**

kesehatan. Adapun untuk rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 penduduk
di Kota Sukabumi Tahun 2024

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah	Rasio
1	dr. Gigi Spesialis	5	1,36
2	Fisioterapis	14	3,81
3	Kesehatan Lingkungan	30	8,16
4	Kesehatan Masyarakat	31	8,44
5	Radiografer	33	8,98
6	Gizi	43	11,70
7	Perekam medis	44	11,97
8	dr. Gigi	56	15,24
9	Apoteker	80	21,77
10	Ahli Tenaga Laboratorium Medik	92	25,04
11	Tenaga Teknis Kefarmasian	104	28,30
12	dr. Spesialis	135	36,74
13	dr. Umum	268	72,93
14	Bidan	327	88,99
15	Perawat	1.277	347,52
TOTAL		2.539	690,97

Sasaran 5	:	Meningkatnya Jaminan Keamanan Pangan, Obat dan Alat Kesehatan bagi Kesehatan Masyarakat
Indikator	:	Persentase Pengawasan Legalitas dan Kemanan Pangan, Obat dan Alat Kesehatan

Memberikan jaminan pangan, obat dan alat kesehatan bagi masyarakat merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Sukabumi pada khususnya. Pencapaian sasaran kinerja ini diakomodir pada program Sedian Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.



Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi selama Tahun Anggaran 2024 dalam upaya memberikan jaminan pangan, obat dan alat kesehatan bagi masyarakat adalah berupa kegiatan :

1. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.
2. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
3. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Sasaran 6	:	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan
Indikator	:	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kelurahan siaga aktif menjadi wadah bagi pemberdayaan masyarakat, masyarakat akan terlibat secara aktif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang dimulai dari lingkungan terkecil yaitu individu dan keluarga/rumah tangga hingga akhirnya berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat.

Kelurahan siaga aktif adalah kelurahan yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau sarana kesehatan lainnya; mengembangkan UKBM (Posyandu, Posyandu PTM, dsb) dan



melaksanakan survailans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku); kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana; serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Jumlah kelurahan siaga aktif di Kota Sukabumi pada tahun 2024 adalah sebanyak 33 kelurahan atau 100% dari jumlah kelurahan yang ada di Kota Sukabumi. Persentase ini menunjukkan bahwa di Kota Sukabumi semua kelurahan yang sudah menjadi kelurahan siaga aktif, yang membedakannya adalah pada tingkatan stratanya. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) adalah wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat, dengan pembinaan sektor kesehatan, lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Posyandu sebagai salah satu bentuk UKBM, dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Salah satu UKBM yang memiliki peran signifikan dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah posyandu. Posyandu dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat



terutama ibu, bayi, dan anak balita. Posyandu memiliki 5 (lima) program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, serta pencegahan dan penanggulangan diare.

Terdapat 461 posyandu pada tahun 2024 di Kota Sukabumi. Dari Semua Posyandu tersebut merupakan Posyandu aktif dan termasuk ke dalam kategori Puskesmas Mandiri.

Sasaran 7	:	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator	:	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan upaya strategis yang diterapkan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel serta kapabel. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi terhadap implementasi SAKIP pada dinas kesehatan Kota Sukabumi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Sukabumi. Berdasarkan surat dari Inspektorat Kota Sukabumi No. PW.02.01.01.02/105/III/1/ITDA/2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) T.A. 2024 tanggal 31 Desember 2024, nilai hasil evaluasi Dinas Kesehatan Kota Sukabumi adalah 79,26 atau predikat BB (Sangat Baik). Berikut



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

adalah nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Sukabumi pada tahun 2023 dan 2024.

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	23,70	24,00
b. Pengukuran Kinerja	30	24,00	24,00
c. Pelaporan Kinerja	15	11,55	12,00
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,25	19,25
Nilai Hasil Evaluasi	100	78,51	79,26
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 dapat dicapai dengan adanya kenaikan indikator nilai SAKIP Dinas Kesehatan sebesar 0,75 bila dibandingkan dengan capaian nilai pada tahun 2023.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

Tabel 3.10
Analisis Efektifitas dan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya
dalam Pencapaian IKU Dinas Kesehatan Kota Sukabumi
Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA/ PROGRAM	CAPAIAN IKU (%)	EFEKTIF/ TIDAK EFEKTIF	Pagu Perubahan TA 2024	Realisasi Anggaran TA 2024	Persentase Capaian (%)	EFISIEN/ TIDAK EFISIEN	% Efisiensi	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
TUJUAN 2 RPD : Terciptanya Kualitas SDM yang Berkarakter dan Kompetitif								
SASARAN 1 : Terpenuhinya SPM Kesehatan								
Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)	108,3	Efektif	78.128.855.725	76.423.552.538	97,82	Efisien	2,18	Dinas Kesehatan
SASARAN 2 : Meningkatkan Akses Mutu dan Pelayanan Kesehatan								
Prevalensi stunting pada balita	102,6	Efektif	78.128.855.725	76.423.552.538	97,82	Efisien	2,18	Dinas Kesehatan
Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	100	Efektif	78.128.855.725	76.423.552.538	97,82	Efisien	2,18	Dinas Kesehatan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	599,7	Efektif	78.128.855.725	76.423.552.538	97,82	Efisien	2,18	Dinas Kesehatan
Sasaran 3 : Meningkatkan Kepesertaan JKN								
Persentase Kepesertaan JKN	100,6	Efektif	21.380.075.412	21.072.571.848	98,56	Efisien	1,44	Dinas Kesehatan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA/ PROGRAM	CAPAIAN IKU (%)	EFEKTIF/ TIDAK EFEKTIF	Pagu Perubahan TA 2024	Realisasi Anggaran TA 2024	Persentase Capaian (%)	EFISIEN/ TIDAK EFISIEN	% Efisiensi	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
Sasaran 4 : Meningkatkan Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas SDM dalam Pelayanan Kesehatan								
Persentase pemenuhan standar tenaga kesehatan minimal di fasilitas pelayanan kesehatan	100	Efektif	2.154.281.906	2.054.501.762	95,37	Efisien	4,63	Dinas Kesehatan
Sasaran 5 : Meningkatkan Jaminan Keamanan Pangan, Obat dan Alat Kesehatan Bagi Kesehatan Masyarakat								
Persentase pengawasan legalitas dan keamanan pangan, obat dan alat kesehatan	100	Efektif	534.031.000	533.696.000	99,94	Efisien	0,06	Dinas Kesehatan
Sasaran 6 : Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dibidang Kesehatan								
Persentase pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	100	Efektif	3.267.258.132	3.256.355.394	99,67	Efisien	0,33	Dinas Kesehatan
Tujuan 6 RPD : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif								
Sasaran 7 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah								



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA UTAMA/ PROGRAM	CAPAIAN IKU (%)	EFEKTIF/ TIDAK EFEKTIF	Pagu Perubahan TA 2024	Realisasi Anggaran TA 2024	Persentase Capaian (%)	EFISIEN/ TIDAK EFISIEN	% Efisiensi	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	99,1	Efektif	435.092.025.069	425.573.477.020	97,81	Efisien	2,19	Dinas Kesehatan

Sumber : Dinas Kesehatan 2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

Tabel 3.11
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pernyataan Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan
1.	Terpenuhinya SPM Kesehatan	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)	92	99,56	108,3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2.	Meningkatnya Akses Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Prevalensi Stunting Pada Balita	6	5,85	102,6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna	15,88	95,25	599,7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3.	Meningkatnya Kepesertaan JKN	Persentase Kepesertaan JKN	98,5	99,23	107,4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4.	Meningkatnya Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas SDM Dalam Pelayanan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Standar Tenaga Kesehatan Minimal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	100	100	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan
5.	Meningkatnya Jaminan Keamanan Pangan, Obat, dan Alat Kesehatan Bagi Kesehatan Masyarakat	Persentase Pengawasan Legalitas dan Keamanan Pangan, Obat dan Alat Kesehatan	100	100	100	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
6.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dibidang Kesehatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Kesehatan	100	100	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	80	79,25	99,1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Kesehatan Kota Sukabumi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 519.176.451.832,00 mengalami kenaikan sebesar 4.64 % bila dibandingkan dengan anggaran kesehatan tahun 2023. Anggaran ini diperuntukkan membiayai 5 (lima) Program yang ada di Dinas Kesehatan yaitu :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dari anggaran yang tersedia dapat diserap sebesar Rp. 519.176.451.832,00 yaitu sebesar 97,82%. Nilai serapan ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan nilai serapan anggaran tahun 2023 yang sebesar 95,85%.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024**

Tabel 3.12
Analisis Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	78.128.855.725	76.423.552.538	97,82
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.154.281.906	2.054.501.762	95,37
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	534.031.000	533.696.000	99,94
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.267.258.132	3.256.355.394	99,67
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	435.092.025.069	425.573.477.020	97,81
	TOTAL	519.176.451.832	507.841.582.714	97,82



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024**

Tabel 3.13
Perbandingan Anggaran Murni dan Anggaran Perubahan Dinkes Tahun Anggaran 2024

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	% Perubahan
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	63.478.878.098	78.128.855.725	23,08
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.562.181.906	2.154.281.906	-15,92
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	524.031.000	534.031.000	1,91
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.244.185.000	3.267.258.132	45,59
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	419.125.553.263	435.092.025.069	3,81
	TOTAL	487.934.829.267	519.176.451.832	6,40



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024**

Tabel 3.14
Perbandingan Anggaran Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2023 dan 2024

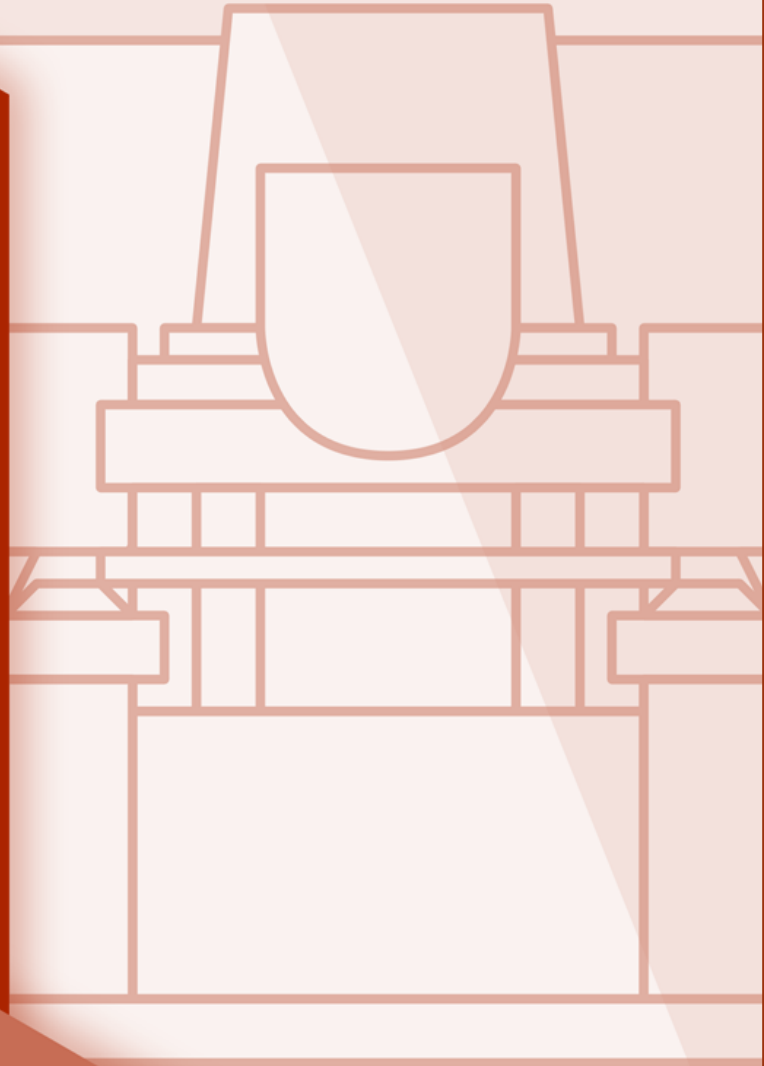
No.	Program	Anggaran 2023 (Rp)	Anggaran 2024 (Rp)	% Penambahan/ Pengurangan
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	77.308.514.509	78.128.855.725	1,06
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.217.581.856	2.154.281.906	-2,85
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	370.356.000	534.031.000	44,19
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.184.101.775	3.267.258.132	2,61
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	355.290.542.022	435.092.025.069	22,46
	TOTAL	425.568.807.774	519.176.451.832	18,43





BAB IV

Penutup



BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi serta sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan kepada Pemerintah Kota Sukabumi.

Dinas Kesehatan Kota Sukabumi telah menetapkan 7 (Tujuh) sasaran strategis, sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan 9 (Sembilan) indikator kinerja, Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Sukabumi tahun 2024 beserta persentase capai kinerja :

1. Indeks Pencapaian SPM (IP SPM), capaian kinerja 108,3%,
2. Prevalensi stunting pada balita, capaian kinerja 102,6%,
3. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial, capaian kinerja 100%,
4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna, capaian kinerja 599,7%,
5. Persentase kepesertaan JKN, capaian kinerja 100,7%,
6. Persentase pemenuhan standar tenaga kesehatan minimal di fasilitas pelayanan kesehatan, capaian kinerja 100%,
7. Persentase pengawasan legalitas dan keamanan pangan obat dan alat kesehatan, capaian kinerja 100%,
8. Persentase pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan, capaian kinerja 100%,
9. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan, capaian kinerja 100%.

Pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas kesehatan Kota Sukabumi sebagai Organisasi Perangkat Daerah bidang kesehatan terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :



1. Sistem kesehatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 1 Tahun 2015 belum optimal dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dalam upaya menangani masalah masalah kesehatan perlu dukungan dari lintas sektor berupa kegiatan kegiatan yang inovatif dan kolaboratif.
2. Belum optimalnya koordinasi antar lintas program dalam hal perencanaan kegiatan, sehingga masih ditemukan kegiatan – kegiatan yang bersifat rutin dan belum fokus terhadap pencapaian indikator kinerja;
3. Belum optimalnya koordinasi dengan lintas sektor terkait peningkatan pencapaian indikator kinerja utama, sehingga kegiatan ditemukan masih parsial dan belum sinergis
4. Masih rendahnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terutama dalam upaya promotif dan preventif;
5. Kurangnya alokasi anggaran sarana, prasarana dan alat untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit yang saat ini telah menjadi penyebab kematian tertinggi;
6. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan SDM kesehatan dalam menangani masalah kesehatan di lapangan terutama diluar kompetensi akademiknya.

4.2. RENCANA TIDAK LANJUT

Dari kendala/permasalahan yang dihadapi tersebut, diperlukan strategi-strategi untuk mengatasinya sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan perubahan sistem kesehatan daerah yang ada sekarang dengan memperhatikan perkembangan kondisi saat ini dan yang akan datang dengan memanfaatkan teknologi dan lebih melibatkan semua komponen masyarakat sehingga dapat mendukung pembangunan kesehatan di daerah dan dapat beradaptasi dengan kondisi kesehatan terburuk seperti pandemi saat ini.



2. Perlu diupayakan berbagai program kesehatan yang lebih inovatif, kolaboratif dan lebih berdaya ungkit besar terhadap capaian kinerja dengan melibatkan sektor lain sehingga timbul sinergitas program/ kegiatan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada terutama dalam hal pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dan indikator kinerja utama;
3. Meningkatkan peran serta sektor terkait, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan program-program kesehatan;
4. Memfokuskan program dan kegiatan terhadap upaya promotif dan preventif melalui pemberdayaan masyarakat;
5. Menggali anggaran dari sektor swasta (CSR) untuk lebih meningkatkan kegiatan yang bersifat promotif/ preventif terutama untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
6. Meningkatkan perhatian terutama dari segi pembiayaan terhadap kasus penyakit tidak menular.

Demikian, gambaran mengenai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi pada tahun 2024 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas berikut strategi pemecahan masalahannya, semoga bermanfaat bagi perencanaan kinerja di tahun yang akan datang.

Sukabumi, 12 Maret 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SUKABUMI,



RENI ROSYIDA MUTHMAINNAH, SKM, M.Si., M.Kes.

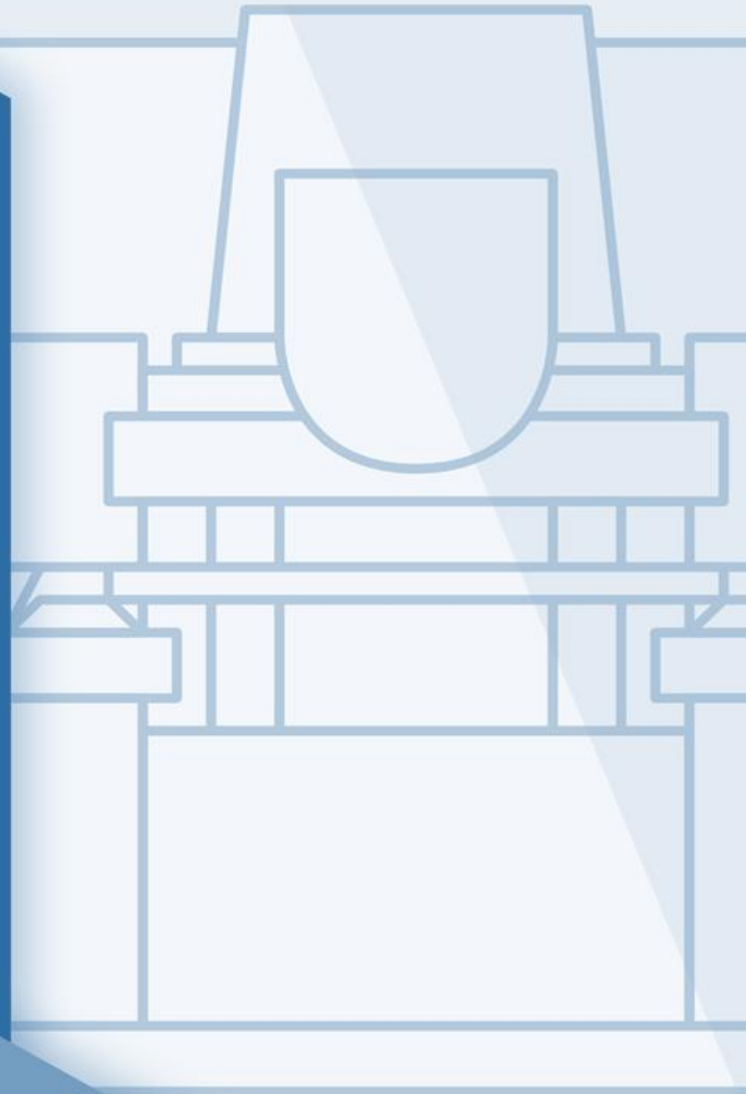
Pembina Tk.I, IV/a

NIP. 19750412 200501 2 009





LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RENI ROSYIDA MUTHMAINNAH, SKM, M.Si, M.Kes**

Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **KUSMANA HARTADJI**

Jabatan : **PENJABAT WALI KOTA SUKABUMI**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukabumi, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

KUSMANA HARTADJI

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SUKABUMI,**

RENI ROSYIDA MUTHMAINNAH, SKM, M.Si, M.Kes

Pembina Tingkat I
NIP. 19751204 200501 2 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas	1.1 Indeks Keluarga Sehat Sukabumi (IKSS)	0,33
2	Terpenuhinya SPM Kesehatan	2.1 Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)	92
3	Meningkatnya Akses Mutu dan Pelayanan Kesehatan	3.1 Prevalensi stunting pada balita	6%
		3.2 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	100%
		3.3 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	15,88%
4	Meningkatnya Kepesertaan JKN	4.1 Persentase kepesertaan JKN	98,5%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	63.478.878.098,00	APBD Kota Sukabumi, DAK Fisik, DAK Non Fisik, DBH-CHT, Kapitasi JKN, Non Kapitasi JKN
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.562.181.906,00	APBD Kota Sukabumi, DAK Non Fisik,
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	524.031.000,00	APBD Kota Sukabumi, DAK Non Fisik
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.244.185.000,00	APBD Kota Sukabumi, DAK Non Fisik
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	419.125.553.263,00	APBD Kota Sukabumi, BLUD
JUMLAH		487.934.829.267,00	

Sukabumi, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. WALI KOTA SUKABUMI,



KUSMANA HARTADJI

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SUKABUMI,**



RENI ROSYIDA MUTHMAINNAH, SKM, M.Si, M.Kes

Pembina Tingkat I
NIP. 19751204 200501 2 009

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS KESEHATAN**

Jl.Suryakencana No. 41 Kota Sukabumi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RENI ROSYIDA MUTHMAINNAH, SKM, M.Si, M.Kes**

Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. KUSMANA HARTADJI**

Jabatan : **PENJABAT WALI KOTA SUKABUMI**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukabumi, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

H. KUSMANA HARTADJI

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SUKABUMI,**

M. RENI ROSYIDA MUTHMAINNAH, SKM, M.Si, M.Kes

Pembina Tingkat I
NIP. 19751204 200501 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terpenuhinya SPM Kesehatan	1.1 Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)	92
2	Meningkatnya Akses Mutu dan Pelayanan Kesehatan	2.1 Prevalensi stunting pada balita	6%
		2.2 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	100%
		2.3 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	15,88%
3	Meningkatnya Kepesertaan JKN	3.1 Persentase kepesertaan JKN	98,5%
4	Meningkatnya pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan kesehatan	4.1 Persentase pemenuhan standar tenaga kesehatan minimal di fasilitas pelayanan kesehatan	100%
5	Meningkatnya jaminan keamanan pangan, obat dan alat kesehatan bagi kesehatan masyarakat	5.1 Persentase pengawasan legalitas dan keamanan pangan, obat dan alat kesehatan	100%
6	Meningkatnya peran serta masyarakat dibidang kesehatan	6.1 Persentase pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	100%
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	7.1 Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	80

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	77.971.132.211,00	APBD Kota Sukabumi, DAK Fisik, DAK Non Fisik, DBH-CHT, Kapitasi JKN, Non Kapitasi JKN
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.154.281.906,00	APBD Kota Sukabumi, DAK Non Fisik,
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	534.031.000,00	APBD Kota Sukabumi, DAK Non Fisik
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.267.258.132,00	APBD Kota Sukabumi, DAK Non Fisik
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	435.092.025.069,00	APBD Kota Sukabumi, BLUD
JUMLAH		519.018.728.318,00	

Sukabumi, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj. WALI KOTA SUKABUMI,



H. KUSMANA HARTADJI

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SUKABUMI,**



RENI ROSYIDA MUTHMAINNAH, SKM, M.Si, M.Kes

Pembina Tingkat I
NIP. 19751204 200501 2 009

**CASCADING RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI
PERIODE TAHUN 2024 - 2026**

RENSTRA PD					
TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	DO	Cara Hitung
1	2	3	4	4	4
DINAS KESEHATAN					
Meningkatnya pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas		-	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi (IKSS)		
	Terpenuhinya SPM kesehatan	Meningkatnya capaian SPM kesehatan	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Kesehatan	Nilai capaian SPM Kesehatan yang diperoleh melalui perhitungan rata - rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima	$IP_{SPM} = (\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times BM) + (\text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times BP)$ Keterangan: IP_{SPM} = Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis Persentase pencapaian penerima layanan dasar = Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan didalam lampiran Permendagri ini. BM = Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20 BP = Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80
	Meningkatnya Akses Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Akses Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Prevalensi stunting pada balita		
			Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Nilai capaian puskesmas yang memiliki 80% obat dan vaksin esensial (pemantauan dilaksanakan terhadap 20 item obat indikator)	$\% \text{ Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vasin esensial} = \frac{\text{Jumlah Puskesmas yang memiliki obat \& vaksin esensial}}{\text{Jumlah Puskesmas di kabupaten/kota yang melapor}} \times 100\%$
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Nilai capaian fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, labkesda, klinik yang dilakukan survey akreditasi dan memperoleh kategori akreditasi paripurna	$\text{Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna} = \frac{\text{Jumlah fasyankes terakreditasi paripurna}}{\text{Jumlah fasyankes yang dilakukan akreditasi}} \times 100\%$
	Meningkatnya Kepesertaan JKN	Meningkatnya cakupan kepesertaan JKN	Persentase kepesertaan JKN	Nilai capaian kepesertaan jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah	$\text{Persentase Kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN di satu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh penduduk di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$
	Meningkatnya pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan kesehatan	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase pemenuhan standar tenaga kesehatan minimal di fasilitas pelayanan kesehatan	Nilai capaian fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memenuhi tenaga kesehatan minimal sesuai dengan ketentuan	$\text{Persentase pemenuhan standar tenaga kesehatan minimal di fasilitas pelayanan kesehatan} = \frac{\text{Jumlah fasyankes yang memenuhi standar tenaga kesehatan minimal}}{\text{Jumlah seluruh fasyankes}} \times 100\%$

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	DO	Cara Hitung
1	2	3	4	4	4
	Meningkatnya jaminan keamanan pangan, obat dan alat kesehatan bagi kesehatan masyarakat	Meningkatnya keamanan pangan, obat dan alat kesehatan	Persentase pengawasan legalitas dan keamanan pangan, obat dan alat kesehatan	Nilai capaian rata - rata perhitungan pengawasan terhadap pemberian izin apotek, toko obat, toko alkes, optikal dan UMOT; sertifikat P-IRT, sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan, penerbitan stiker pembinaan makanan jajanan serta pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan makanan industri rumah tangga	Persentase pengawasan legalitas dan keamanan pangan, obat dan alat kesehatan Jumlah rata - rata capaian dari persentase pemenuhan pemberian izin apotek, toko obat, toko alkes, optikal dan UMOT, persentase pemenuhan sertifikat P-IRT, persentase pemenuhan SLHS TPM, persentase pemenuhan penerbitan stiker pembinaan makanan jajanan, persentase pemenuhan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan makanan IRT
	Meningkatnya peran serta masyarakat dibidang kesehatan	Meningkatnya peran serta masyarakat bidang kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	Nilai capaian pemenuhan advoksi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat; pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan prevenif; pengembangan dan pelaksanaan UKBM	Persentase pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan jumlah rata - rata capaian persentase pemenuhan advoksi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat; persentase pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan prevenif; persentase pengembangan dan pelaksanaan UKBM
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesehatan			Predikat SAKIP Dinas Kesehatan		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang kesehatan	Persentase pemenuhan kualitas kinerja pelayanan publik di fasilitas kesehatan		

Sukabumi, 12 Februari 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Kes. Sukabumi



Dr. RENI ROSYIDA MUTHMAINNAH, M.Si., M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19751204 200501 2 009



PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
DINAS KESEHATAN

Jalan Suryakencana No. 41 Kota Sukabumi Kode Pos 43114 Provinsi Jawa Barat
Telp./Fax. 0266-221213

website : <https://dinkes.sukabumikota.go.id>, email : dinkes_kotsi@sanapati.net

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan indikator kinerja utama perangkat daerah;

b. bahwa Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 - 2026 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024 - 2026 merupakan sebagai tolok ukur penilaian kinerja Instansi Pemerintah;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024 - 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026;
9. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 141);
10. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 25).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Indikator Kerja Utama Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2024 - 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SUKABUMI,



RENI ROSYIDA MUTHMAINNAH, SKM, M.Si, M.Kes

Pembina Tk. 1

NIP. 19751204 200501 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI
NOMOR : TAHUN 2024
TANGGAL : JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI TAHUN
2024 - 2026

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kesehatan Kota Sukabumi
2. Tugas : membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kesehatan
3. Fungsi : a. perumusan kebijakan bidang kesehatan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas bidang kesehatan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran	Indikator	Target		
			2024	2025	2026
1	Terpenuhinya SPM kesehatan	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)	92	92	92
2	Meningkatnya Akses Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Prevalensi stunting pada balita	6	5.75	5.5
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	100	100	100
		Persentasi fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	15.88	18.16	20.44
5	Meningkatnya Kepesertaan JKN	Persentase Kepesertaan JKN	98.5	98.6	98.7
6	Meningkatnya pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan kesehatan	Persentase pemenuhan standar tenaga kesehatan minimal di fasilitas pelayanan kesehatan	100	100	100
7	Meningkatnya jaminan keamanan pangan, obat dan alat kesehatan bagi kesehatan masyarakat	Persentase pengawasan legalitas dan keamanan pangan, obat dan alat kesehatan	100	100	100
8	Meningkatnya peran serta masyarakat dibidang kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	100	100	100
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	80	80	80

5. Perhitungan Indikator Kinerja Utama :

No	Indikator	Definisi Operasional	Perhitungan	Sumber Data
1	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)	Nilai capaian SPM Kesehatan yang diperoleh melalui perhitungan rata - rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima	Jumlah capaian persentase 12 Indikator SPM Kesehatan dibagi 12 dikali 100 persen	Aplikasi e-spm bangda
2	Prevalensi stunting pada balita	Nilai capaian status gizi balita berdasarkan tinggi badan dibandingkan dengan umur (TB/U)	Jumlah balita dengan tinggi badan pendek dan sangat pendek (TB/U) dibagi jumlah balita yang ditimbang dikali 100 persen	Aplikasi eppbgm
3	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Nilai capaian puskesmas yang memiliki 80% obat dan vaksin esensial (pemantauan dilaksanakan terhadap 20 item obat indikator)	Jumlah capaian persentase ketersediaan obat di puskesmas dibagi jumlah puskesmas dikali 100 persen	Laporan Bidang SDK
4	Persentasi fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Nilai capaian fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit, puskesmas, labkesda, klinik yang dilakukan survey akreditasi dan memperoleh kategori akreditasi paripurna	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dengan hasil survey akreditasi paripurna dibagi jumlah seluruh fasilitas kesehatan dikali 100 persen	Laporan Bidang Yankes
5	Persentase Kepesertaan JKN	Nilai capaian kepesertaan jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah	Jumlah penduduk yang telah mengikuti kepesertaan JKN dibagi seluruh jumlah penduduk dikali 100 persen	Laporan Bidang SDK
6	Persentase pemenuhan standar tenaga kesehatan minimal di fasilitas pelayanan kesehatan	Nilai capaian fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas yang telah memenuhi tenaga kesehatan minimal sesuai dengan ketentuan	Jumlah fasilitas kesehatan Puskesmas yang memenuhi standar tenaga kesehatan minimal dibagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dikali 100 persen	Laporan Bidang SDK

No	Indikator	Definisi Operasional	Perhitungan	Sumber Data
7	Persentase pengawasan legalitas dan keamanan pangan, obat dan alat kesehatan	Nilai capaian rata - rata perhitungan pengawasan terhadap pemberian izin apotek, toko obat, toko alkes, optikal dan UMOT; sertifikat P-IRT, sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan, penerbitan stiker pembinaan makanan jajanan serta pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan makanan industri rumah tangga	Jumlah rata – rata capaian persentase pemenuhan pemberian izin apotek, took obat, toko alkes, optikal dan UMOT, persentase pemenuhan sertifikat P-IRT, persentase pemenuhan SLHS TPM, pemenuhan penerbitan striker pembinaan makanan jajanan, persentase pemenuhan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan makanan IRT	Laporan Bidang Kesmas & SDK
8	Persentase pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	Nilai capaian pemenuhan advoksi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat; pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan prevenif; pengembangan dan pelaksanaan UKBM	Jumlah rata – rata capaian persentase pemenuhan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat; persentase pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif, persentase pengembangan dan pelaksanaan UKBM	Laporan Bidang Kesmas
9	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Nilai capaian laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan	Jumlah capaian nilai SAKIP Dinkes	LHE SAKIP dari Inspektorat

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2024



KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SUKABUMI,

RENI ROSYIDA MUTHMAINNAH, SKM, M.Si, M.Kes
Pembina Tk. 1
NIP. 19751204 200501 2 009

PERHITUNGAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Input			Output		Unit Cost Output (UCO)		Hasil Perhitungan Rumus (%)	% Efisiensi	OUTCOME		Unit Cost Outcome		% Efektifitas	Keterangan
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi			Rencana	Realisasi	rencana	realisasi		
1	2	3	4		5	6	7= 3 : 5	8 = 4 : 6	9 =7-(8-7)/7 x 100	3,00	11	12	13=5 : 11	14=6 : 12	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	435.092.025.069	425.573.477.020	97,81	100	100,0	4.350.920.251	4.255.734.770	102,19	2,19	100	100,0	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	201.275.000	195.439.600	97,10	100	100	2.012.750	1.954.396	102,90	2,90	100	100	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.000.000	42.997.500	99,99	2	2	21.500.000	21.498.750	100,01	0,01	2	2	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	3.000.000	100,00	1	1	3.000.000	3.000.000	100,00	0,00	1	1	1.000	1.000	100,00	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.750.000	3.750.000	100,00	1	1	3.750.000	3.750.000	100,00	0,00	1	1	1.000	1.000	100,00	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.925.000	9.925.000	100,00	4	4	2.481.250	2.481.250	100,00	0,00	4	4	1.000	1.000	100,00	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.600.000	135.767.100	95,88	1	1	141.600.000	135.767.100	104,12	4,12	1	1	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.675.816.035	79.411.169.256	99,67	100	100	796.758.160	794.111.693	100,33	0,33	100	100	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	79.549.562.110	79.285.052.991	99,67	994	994	80.029.741	79.763.635	100,33	0,33	994	994	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.312.500	12.312.350	100,00	1	1	12.312.500	12.312.350	100,00	0,00	1	1	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.865.300	10.865.250	100,00	12	12	905.442	905.438	100,00	0,00	12	12	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.2.2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	103.076.125	102.938.665	99,87	1	1	103.076.125	102.938.665	100,13	0,13	1	1	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.700.000	29.700.000	100,00	100	100,00	297.000	297.000	100,00	0,00	100	100,00	1.000	1.000	100,00	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00	1	1	10.000.000	10.000.000	100,00	0,00	1	1	1.000	1.000	100,00	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.200.000	8.200.000	100,00	1	1	8.200.000	8.200.000	100,00	0,00	1	1	1.000	1.000	100,00	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.500.000	11.500.000	100,00	1	1	11.500.000	11.500.000	100,00	0,00	1	1	1.000	1.000	100,00	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	103.000.000	102.200.000	99,22	100	100	1.030.000	1.022.000	100,78	0,78	100	100	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	103.000.000	102.200.000	99,22	15	15	6.866.667	6.813.333	100,78	0,78	15	15	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.244.835.050	3.186.126.019	98,19	100	100	32.448.351	31.861.260	101,81	1,81	100	100	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	63.500.000	63.500.000	100,00	12	12	5.291.667	5.291.667	100,00	0,00	12	12	1.000	1.000	100,00	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	362.500.000	360.848.297	99,54	12	12	30.208.333	30.070.691	100,46	0,46	12	12	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.225.300.550	2.174.740.494	97,73	14	14	158.950.039	155.338.607	102,27	2,27	14	14	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	153.534.500	153.058.400	99,69	2	2	76.767.250	76.529.200	100,31	0,31	2	2	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.5	Facilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000	59.347.619	98,91	12	12	5.000.000	4.945.635	101,09	1,09	12	12	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380.000.000	374.631.209	98,59	12	12	31.666.667	31.219.267	101,41	1,41	12	12	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	445.000.000	443.746.000	99,72	100	100	4.450.000	4.437.460	100,28	0,28	100	100	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	445.000.000	443.746.000	99,72	12	12	37.083.333	36.978.833	100,28	0,28	12	12	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.710.287.072	4.657.231.206	98,87	100	100	47.102.871	46.572.312	101,13	1,13	100	100	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00	12	12	250.000	250.000	100,00	0,00	12	12	1.000	1.000	100,00	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.502.647	332.309.109	99,34	12	12	27.875.221	27.692.426	100,66	0,66	12	12	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.7	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	493.118.025	478.914.200	97,12	12	12	41.093.169	39.909.517	102,88	2,88	12	12	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.879.666.400	3.843.007.897	99,06	12	12	323.305.533	320.250.658	100,94	0,94	12	12	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.242.250.000	1.238.421.812	99,69	100	100	12.422.500	12.384.218	100,31	0,31	100	100	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	284.750.000	284.463.725	99,90	12	12	23.729.167	23.705.310	100,10	0,10	12	12	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.000.000	52.710.290	95,84	12	12	4.583.333	4.392.524	104,16	4,16	12	12	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	902.500.000	901.247.797	99,86	12	12	75.208.333	75.103.963	100,14	0,14	12	12	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.9	Peningkatan Pelayanan BLUD	345.439.861.912	336.309.443.127	97,36	100	100	3.454.398.619	3.363.094.431	102,64	2,64	100	100	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.9.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - RSUD R Syamsudin Sh	325.790.630.909	318.395.581.651	97,73	3	3	108.596.876.970	106.131.860.550	102,27	2,27	3	3	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
1.9.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - RSUD Al-Mulk	16.647.791.105	15.297.686.679													
1.9.3	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - Puskesmas Selabatu	3.001.439.898	2.616.174.797													
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	78.128.855.725	76.423.552.538	97,82	100	100,00	781.288.557	764.235.525	102,18	2,18	100	97,00	1.000	1.031	96,91	efisien tetapi tidak efektif
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.768.683.023	20.392.368.130	98,19	100	100,00	207.686.830	203.923.681	101,81	1,81	100	92,22	1.000	1.084	91,57	efisien tetapi tidak efektif
2.1	Pengembangan Puskesmas	1.425.000.000	1.424.898.780	99,99	100	100	14.250.000	14.248.988	100,01	0,01	100	100	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
2.1	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.710.000.000	1.70.830.000	99,90	100	30	1.710.000	5.694.333	-133,00	-233,00	100	30	1.000	1.000	100,00	inefisien dan tidak efektif sesuai harapan
2.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.750.000.000	1.741.116.000	99,49	100	100	17.500.000	17.411.160	100,51	0,51	100	100	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
2.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.500.000.000	1.493.429.029	99,56	100	100	15.000.000	14.934.290	100,44	0,44	100	100	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
2.1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.194.556.093	7.916.624.963	96,61	100	100	81.945.561	79.166.250	103,39	3,39	100	100	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Input			Output		Unit Cost Output (UCO)		Hasil Perhitungan Rumus (%)	% Efisiensi	OUTCOME		Unit Cost Outcome		% Efektifitas	Keterangan
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi			Rencana	Realisasi				
													3	4		
2.1	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	125.919.000	121.504.623	96,49	100	100	1.259.190	1.215.046	103,51	3,51	100	100	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
2.1	Pengembangan Rumah Sakit	825.000.000	823.160.801	99,78	100	100	8.250.000	8.231.608	100,22	0,22	100	100	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
2.1	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.645.155.130	6.568.761.534	98,85	100	100	66.451.551	65.687.615	101,15	1,15	100	100	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
2.1	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	132.052.800	132.042.400	99,99	15	15	8.803.520	8.802.827	100,01	0,01	15	15	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota	56.493.053.702	55.172.634.408	97,66	100	100,00	564.930.537	551.726.344	102,34	2,34	100	95,78	1.000	1.044	95,59	efisien tetapi tidak efektif
2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	463.095.000	463.095.000	100,00	100	100	4.630.950	4.630.950	100,00	0,00	100	100	1.000	1.000	100,00	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	318.650.000	305.577.000	95,90	100	100	3.186.500	3.055.770	104,10	4,10	100	100	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	181.712.640	180.660.052	99,42	100	100	1.817.126	1.806.601	100,58	0,58	100	100	1.000	1.000	100,00	efisien dan efektif sesuai harapan
2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	15.305.000	15.305.000	100,00	100	100	153.050	153.050	100,00	0,00	100	100	1.000	1.000	100,00	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	400.700.000	393.050.000	98,20	100	100	4.007.000	3.930.500	101,80	1,80	100	96,62	1.000	1.035	96,50	efisien tetapi tidak efektif

**FORM MONITORING EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP
TAHUN 2023**

SKPD : DINAS KESEHATAN

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres		Link Bukti Dukung	Keterangan
					selesai	sedang proses		
1	Meningkatkan keberadaan dokumen perencanaan secara lebih berkualitas sesuai standar yang baik untuk mencapai hasil ukuran keberhasilan yang SMART.	Melaksanakan pertemuan penyusunan dokumen perencanaan tahun 2025	Triwulan I 2024	Sekretaris	√		https://drive.google.com/drive/folders/1YcurcR6UHA9Uqlrk2sVZa-Pn16ANnpO?usp=sharing	
		Memfasilitasi unit kerja dalam pengusulan rencana kegiatan tahun 2025	Triwulan I 2024	Sekretaris	√			
		Melaksanakan Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Untuk Penyusunan Perencanaan Tahun 2025	Triwulan I 2024	Sekretaris	√			
		Memfasilitasi unit kerja dalam penyusunan dokumen Pra RKA terhadap Unit Kerja	Triwulan I 2024	Sekretaris	√			
		Memfasilitasi unit kerja dalam pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Triwulan I 2024	Sekretaris	√			
		Menyusun rancangan dokumen Renja Dinkes Tahun 2025	Triwulan I 2024	Sekretaris	√			
2	Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian reward and punishment, serta penyesuaian strategi dalam pencapaian kinerja.	Memberikan reward terhadap Puskesmas atas kinerja pencapaian program kesehatan Tahun 2023	Jan - April 2024	Kepala Bidang	√		https://drive.google.com/drive/folders/1YnA9barxbS7vvyV59zBVUE-NK_SkidFn?usp=drive_link	
3	Menyempurnakan laporan kinerja tahunan (LKjIP) dengan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja serta mencantumkan analisis dan evaluasi atas realisasi kinerja dengan target jangka menengah, dengan target tahun - tahun sebelumnya serta dapat melengkapi informasi atas analisis evaluasi kinerja dengan level nasional (Benchmark kinerja)	Menyusun rancangan LKjIP tahun 2023 berdasarkan template yang telah ditetapkan	Januari 2024	Sekretaris	√		https://drive.google.com/drive/folders/1YoAEqk57MN_YYBGzytBspUKK8_vq60qW?usp=drive_link	
4	Menjadikan laporan kinerja sebagai bahan evaluasi dalam penyesuaian strategi/ kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya sehingga memberikan dampak yang nyata.	Melaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023, dimana hasil evaluasi menjadi bahan untuk penyusunan perencanaan tahun 2025.	Januari 2024	Sekretaris	√		https://drive.google.com/drive/folders/1B2WnsEgfDxC4-1XV_nGRLrVcNKHRAE0p?usp=drive_link	
		Melaksanakan evaluasi setiap triwulan terhadap pencapaian kinerja dan keuangan	setiap triwulan	Sekretaris		√		
5	Terus meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pengukuran capaian kinerja	Penggunaan aplikasi SIPEKA untuk melihat capaian kinerja dan keuangan dari Bappeda	setiap triwulan	Sekretaris		√	https://sipeka.sukabumikota.go.id/app/sampeu/login/	
		Penggunaan aplikasi eppgbm untuk mengukur status gizi balita dari Kemenkes	setiap bulan	Kabid Kesmas		√	https://siqiziterpadu.kemkes.go.id/login_sisfo/	
		Penggunaan aplikasi ASIK untuk mengukur capaian imunisasi dari Kemenkes	setiap bulan	Kabid P2P		√	https://sehatindonesiaku.kemkes.go.id/auth/login	
		Penggunaan aplikasi SI-PTM untuk mengukur capaian kinerja pelayanan kesehatan usia produktif	setiap bulan	Kabid P2P		√	https://p2ptm.kemkes.go.id/aplika-si-dan-program-ptm/si-ptm	
		Penggunaan aplikasi Komdat untuk mengukur capaian kinerja pelayanan kesehatan masyarakat	setiap triwulan	Kabid Kesmas		√	https://komdatkesmas.kemkes.go.id/login	
6	Dapat melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi	Penggunaan aplikasi SIPEKA untuk melihat capaian kinerja dan keuangan dari Bappeda	setiap triwulan	Sekretariat		√	https://sipeka.sukabumikota.go.id/app/sampeu/login/	
		Penggunaan Aplikasi ePuskesmas untuk memastikan pelayanan di Puskesmas					https://kotasukabumi.epuskesmas.id/login	
		Penggunaan SIPD untuk proses perencanaan dan penganggaran					https://sipd-ri.kemendagri.go.id/auth/login	
		e-kinerja untuk SKP					https://kinerja.bkn.go.id/login	
7	Terus berupaya meningkatkan implementasi hasil evaluasi AKIP secara berkelanjutan yang telah dibangun di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.	Dinas Kesehatan, berkomitmen untuk mengimplementasikan hasil evaluasi AKIP secara berkelanjutan	setiap bulan	Kepala Dinas		√	https://drive.google.com/drive/folders/1_waqoB8bACBGsEK1jfrCIXP2qS2WCczv?usp=sharing	



Sukabumi, 3 Januari 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Hda Sukabumi

Ren Rosvidya, M. Humainnah, SKM, M.Si, M.Kes
Pembina Tk 1
NIP. 19751204 200501 2 009